

**IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI DESA BOLLI KECAMATAN
PONRE KABUPATEN BONE**

TESIS

**ALI YUSRAN
NIM: 4617103048**



Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi untuk memperoleh gelar magister

**PROGRAM PASCASARJANA ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan
Pembangunan Di Desa Bolli Kecamatan Ponre
Kabupaten Bone

Nama : Ali Yusran

Nim : 4617103048

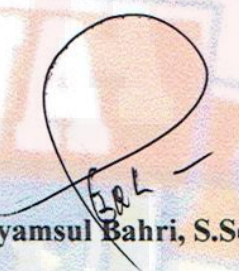
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyetujui,
Komisi pembimbing:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, S.H, M.Pd


Dr. Syamsul Bahri, S.Sos, M.Si

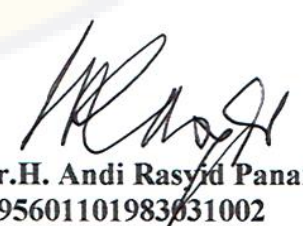
Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi Magister
Administrasi Publik



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si
NIDN. 0913017402


Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, S.H, M.Pd
NIP. 195601101983031002

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari/ tanggal :

Tesis atas nama : Ali Yusran

Nim : 4617103048

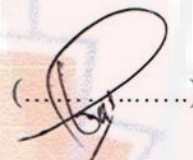
Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pasca Sarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

Panitia Ujian Tesis

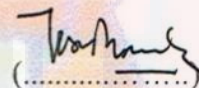
Ketua : Prof. Dr. Andi Rasyid Pananrangi, SH., M.Pd.



Sekretaris : Dr.Syamsul Bahri, S.Sos, M.Si.



Penguji :1. Prof. Dr.H. Husain Hamka, M.Si.



2. Dr. Uddin B. Sore, S.Ip, S.H.,M.Si

(.....)

Makassar,

2019



Direktur:

Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si.
NIDN: 0913017402

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis ini merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan data atau tulisan dan pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan sendiri, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagian atau keseluruhan tesis ini merupakan karya orang lain atau tulisan orang lain saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 2019

Mahasiswa



ALI YUSRAN

IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BOLLI KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE

Ali Yusran

Program Studi Administrasi Publik Universitas Bosowa

ABSTRAK

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntuhkan untuk desa, bantuan keuangan dari APBN diharapkan akan menjadi sumber pendapatan desa untuk menunjang pembangunan yang ada di desa. Dana desa merupakan kebijakan publik yang banyak diperbincangkan di pemerintahan samapai dikalangan masyarakat desa. Dana desa digunakan sepenuhnya untuk memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perencanaan pembangunan, implementasi dana desa dan hasil evaluasi dana desa di desa Bolli.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dalam pengambilan sampel dengan menentukan beberapa informan dengan kriteria yang telah di tentukan terlebih dahulu Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan *interview, observasi, library study dan dokumentasi*. Teknik analisis data menggunakan teori *Miles and Huberman* yaitu mengumpulkan data, mereduksi data atau mengolah data dan penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penggunaan dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di desa Bolli melakukan perencanaan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Pembangunan fokus pada prioritas pembangunan infrastruktur jalan sehingga sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil evaluasi perencanaan sebagian program pembangunan sudah direalisasikan dan masih ada yang belum drealisasikan. Penyaluran dan penyerapannya sudah berjalan dengan baik. Implementasi dana desa dalam melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa belum mampu menjadikan desa Bolli menjadi desa yang mandiri.

Kata kunci: *Dana Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*

**IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUNDS IN THE
IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT IN VILLAGE
BOLLI PONRE SUBDISTRICT, BONE REGENCY**

Ali Yusran

Bosowa University Public Administration Study Program

ABSTRACT

Village funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget which is devoted to the village, financial assistance from the State Budget is expected to be a source of village income to support development in the village. village funding is a public policy that is widely discussed in the government to the village community. village funds are used fully to facilitate the development and empowerment of rural communities aimed at improving the welfare of rural communities, improving the quality of life and poverty alleviation. The aims of this research are to find out development planning in Bolli, implementation of village funds and the result of village funds evaluation in Bolli.

The type of research used in this study is qualitative research using analytical descriptive research methods. in this study using purposive sampling in sampling by determining several informants with predetermined criteria. Data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques using interviews, observation, library study and documentation. Data analysis techniques using the theory of Miles and Huberman namely collecting data, reducing data or processing data and presenting data.

The results showed that in the use of village funds in village development and community empowerment in the village of Bolli planning through development planning meetings. development focus on the priority of road infrastructure development so that other facilities and infrastructure needed by the community are not met. Based on the evaluation results, some of the development programs have been realized and there are still some that have not been realized. distribution and absorption has been going well. The implementation of village funds in implementing village development and village community empowerment has not been able to make the village of Bolli become an independent village.

Keywords: village budget, village development and community empowerment

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Dengan petunjuk-Nya penulis dapat melalui kesulitan dan hambatan yang dihadapi selama penulisan tesis ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik

Maksud dari penulisan tesis ini adalah sebagai persyaratan akademik untuk penyelesaian studi dan memperoleh gelar Magister (S2) pada Universitas Bosowa Makassar.

Selama melaksanakan penelitian dan penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Untuk itu saya ucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si. Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak Dr. Syamsul Bahri, S.Sos.,M.Si. Asisten Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar, sekaligus pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan banyak masukan kepada penulis.
3. Bapak Prof.Dr.H Andi Rasyid Pananrangi, S.H., M.Pd. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, sekaligus pembimbing I, yang telah

4. meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi banyak masukan atau motivasi kepada penulis.
5. Dosen Pascasarjana Administrasi Publik Universitas Bosowa Makassar, yang telah mengajari banyak ilmu tentang administrasi publik kepada penulis.
6. Orang tua tercinta yang mendidik dan mendukung sampai bisa menuntut ilmu kejenjang yang lebih tinggi, serta doa yang luar biasa untuk penulis.
7. Rekan-rekan mahasiswa pascasarjana ilmu administrasi publik yang telah banyak membantu penulis.
8. Keluarga yang selalu memberi motivasi dan dukungan kepada penulis.
9. Sahabat dan rekan-rekan organisasi yang senantiasa selalu mendukung dan membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berusaha untuk memaksimalkan tesis ini. Jika seandainya terdapat kekurangan atau kekeliruan, penulis siap menerima saran yang sifatnya konstruktif agar penulisan tesis ini dapat lebih baik. Semoga tesis ini dapat bermamfaat.

Makassar, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Kajian Pustaka	9
1. Perencanaan pembangunan	9
2. Implementasi pembangunan	11
3. Evaluasi	14

4. Kebijakan Publik.....	15
a. Analisis SWOT	18
b. Konsep pelayanan publik	25
c. Perencanaan Kebijakan Publik.....	28
d. Implementasi Kebijakan Publik	38
e. Evaluasi Kebijakan Publik	53
5. Pemerintah Desa	59
a. Konsep Pembangunan Desa	66
b. Dana Desa	67
c. Pemberdayaan Masyarakat.....	81
d. Program Padat karya dan cash for work.....	83
e. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).....	85
B. Penelitian Terdahulu.....	87
C. Kerangka Konseptual.....	91
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	94
B. Informan Penelitian	94
C. Sumber Data	95
D. Teknik Pengumpulan Data	96
E. Teknik Analisis Data	98
F. Lokasi Dan Jadwal Penelitian.....	102

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Lokasi Penelitian 103

B. Hasil Penelitian..... 121

C. Pembahasan 138

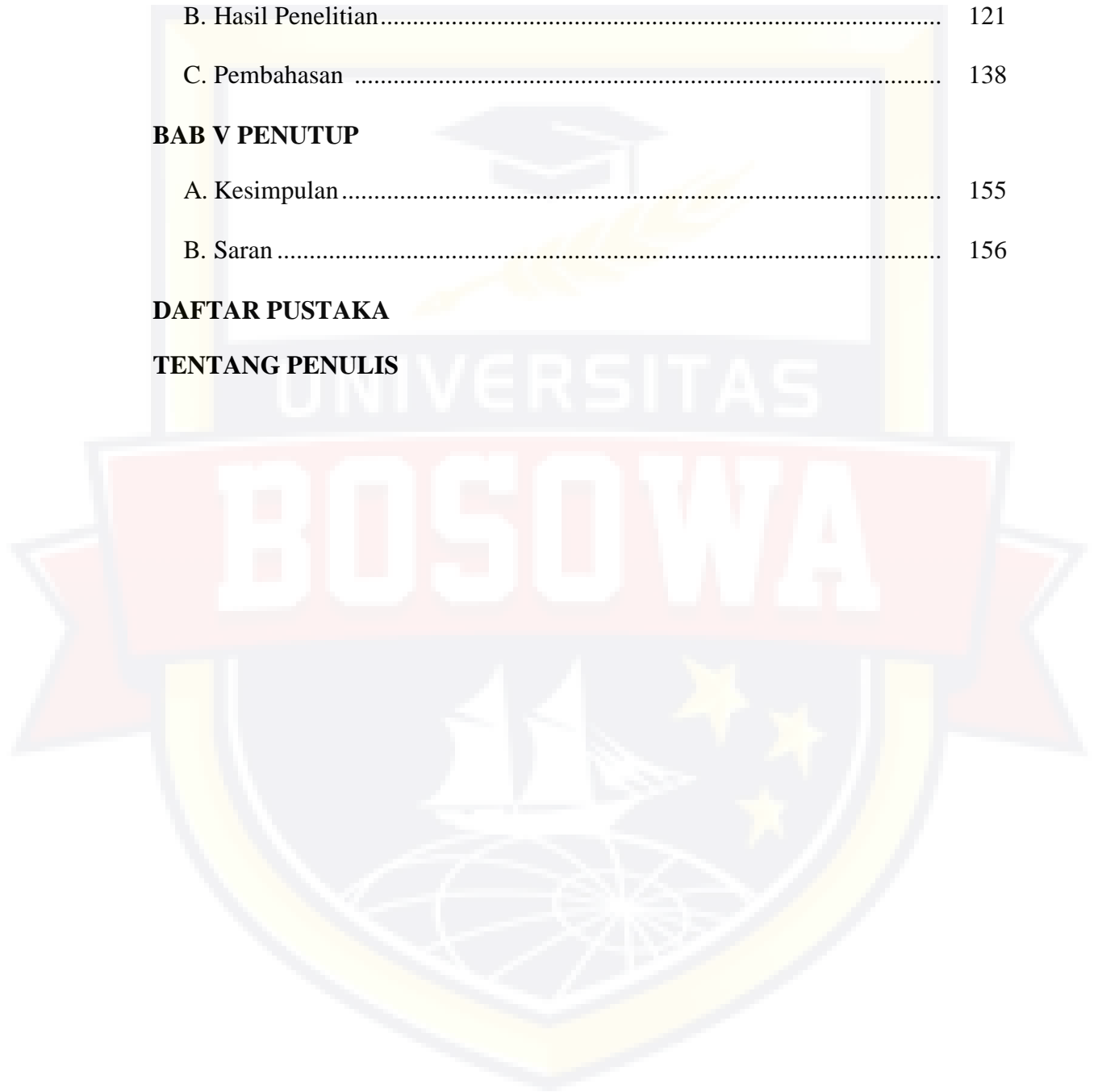
BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 155

B. Saran 156

DAFTAR PUSTAKA

TENTANG PENULIS



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Analisis SWOT, Klasifikasi Isu	21
Tabel 2.2 : Aktivitas-aktivitas tahap implementasi kebijakan.....	44
Tabel 2.3 : Perbedaan Penelitian Terdahulu	89
Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	113
Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	114
Tabel 4.3 : Mutasi Penduduk Pada Wilayah Setiap Dusun	115
Tabel 4.4 : Tabel Perencanaan Penggunaan Dana Desa.....	142
Tabel 4.5 : Output Dana Desa Di Desa Bolli.....	149

BOSOWA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Model Proses Implementasi Strategi	23
Gambar 2.2 : Model Merile S. Grindle	47
Gambar 2.3 : Dasar Peraturan Desa Dan Dana Desa	72
Gambar 2.4 : Kerangka Konsep Penelitian	89
Gambar 3.1 : Komponen Analisis Data Miles And Huberman	93
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Desa Bolli	104
Gambar 4.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	114
Gambar 4.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	115
Gambar 4.4 : Mutasi Jumlah Penduduk Pada Wilayah Setiap Dusun	116

BOSOWA

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat rekomendasi izin penelitian dari Universitas Bosowa Program Pascasarjana
- II. Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu terpadu Kabupaten Bone
- III. Pedoman Wawancara
- IV. Daftar Nama Informan Penelitian
- V. Denah Desa Bolli
- VI. Dokumentasi hasil penelitian

HALAMAN SINGKATAN

ADD	= Alokasi Dana Desa
APBDes	= Anggaran Pendapatan Belanja Desa
APBN	= Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APIP	= Aparat Pengawas Intern Pemerintah
BPD	= Badan permusyawaratan desa
BPK	=Badan Pemeriksa Keuangan
BUMDes	= Badan Usaha Milik Desa
DPD	= Dewan Perwakilan Daerah
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
Juknis	= Petunjuk Teknis
KPK	= Komisi Pemberantasan Korupsi
Musdus	= Musyawarah Dusun
Musrenbang	= Musyawarah Rencana Pembangunan
MPR	= Majelis Permusyawaratan Rakyat
PAUD	= Pendidikan Anak Usia Dini
PDRB	= Produk Domestik Regional Bruto
Permendes	= Peraturan Menteri Desa
Perpu	= Peraturan Perundang-Undangan
Permendagri	= Peraturan Menteri Dalam Negeri
PMK	= Peraturan Menteri Keuangan
PP	= Peraturan Pemerintah
RAB	= Rencana Anggaran Bangunan
RKD	= Rekenin Keungan Desa

RKPD	= Rencana Kerja Pemerintah Desa
RKUD	= Rekening Kas Umum Negara
RKUN	= Rekening Kas Umum Daerah
RPJM	= Rencana Pembangunan Jangka Menengah
SDM	= Sumber Daya Manusia
UU	= Undang-Undang



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai wujud pengakuan negara terhadap Desa, khususnya dalam rangkamenemperjelas fungsi dan kewenangan Desa, serta memperkuat kedudukan Desa dan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan, di perlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai Desa yang di wujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Saat ini pemerintah Indonesia melalui nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, di antaranya dengan meningkatkan pembangunan di Desa. dengan komitmen tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan program Dana Desa. Program Dana Desa bukan hanya yang pertama di Indonesia namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memeberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa. Kebijakan ini sekaligus mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada Desa yang selama ini sudah ada.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukkan untuk Desa, bantuan keuangan dari APBN diharapkan akan menjadi sumber pendapatan Desa untuk menunjang pembangunan yang ada di Desa. Dana Desa digunakan sepenuhnya untuk memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan. Penetapan penggunaan Dana Desa sesuai dengan yang telah di prioritaskan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Besaran Dana Desa yang diterima setiap Desa, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten atau kota dibagi jumlah Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan Alokasi formula dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan Indeks kesulitan wilayah. Besaran anggaran Dana Desa yang akan diterima oleh setiap kabupaten atau kota dari APBN melalui APBD akan berbeda dengan kota yang lain, kemudian Dana Desa yang diterima akan dibagikan ke setiap Desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah pedesaan dalam RPJMN 2015-2019, maka penggunaan Dana Desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan Desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian Desa. Penggunaan Dana Desa yang pada dasarnya merupakan suatu hak pemerintah Desa yang sesuai dengan kewenangan dan apa prioritas kebutuhan masyarakat Desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Untuk mengawal dan memastikan

pencapaian sasaran pembangunan Desa maka ditetapkan prinsip penggunaan Dana Desa yaitu: (1) Keadilan yang mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan. (2) Kebutuhan prioritas untuk mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih di butuhkan dan berhybungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. (3)Kewenangan Desa yang mengutamakan kewenangan hak, asal usul dan kewenangan lokal yang berskala Desa. (4) Partisipatif yang mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat Desa. (5) Swakelola yang berbasis sumber daya Desa yang mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran, keterampilan warga Desa dan kearifan lokal. (6) Tipologi Desa yang memepertimbangkan keadaan karakteristik geografis, sosiologi, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Kabupaten Bone merupakan salah satu dari 24 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 4.559 km². Secara administratif Kabupaten Bone terdiri dari 27 kecamatan, dan 372 Desa/kelurahan. DesaBolli berada pada kawasan administratif Kecamatan Ponre, terletak 40 km dari kota Watampone, DesaBolli terdidri dari 7 Dusun, yaitu DusunBolli, DusunLawari, DusunPadangloang, DusunCiro, DusunBarugae, Dusun Sancereng dan DusunMaroanging. letak geografis DesaBolli tepat berada di daerah perbukitan dan berdampingan dengan area perkebunan tebu Arasaoe. mata pencarian utama masyarakat DesaBollimayoritas petani khususnya padi, cengkeh, peternak sapi dan pembuat gula merah.

Setiap tahunnya pemerintah pusat mengeluarkan anggaran untuk Dana Desa, pada tahun 2016 sebesar 20,67 triliun, tahun 2017 sebesar 46,98 triliun, tahun 2018 sebesar 60 triliun, tahun 2019 sebesar 60 triliun dan tahun 2019 sebesar 70 triliun. Dana Desa tersebut diberikan keseluruh Desa di Indonesia dengan formula 77 persen dibagi rata keseluruh Desa kemudian sisahnya di alokasikan untuk tambahan secara proporsional kepada Desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah. Pada tahun 2019 Desa Bolli mendapat kucuran Dana Desa dari pemerintah pusat sebesar Rp. 1.245.581.000. dalam APBDes Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone tahun anggaran 2019, pendapatan dari Dana Desa = Rp.1.245.581.000, BHPR = Rp.20.087.700 dan ADD = Rp.341.806.700 total pendapatan sebesar Rp.1.607.473.400. pembelanjaan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Desa = Rp.341.806.700, bidang pelaksanaan pembangunan = Rp.1.225.315.000, bidang pembinaan masyarakat = Rp.20.085.700 dan bidang pemberdayaan masyarakat = Rp.20.266.000. total pembelanjaan sebesar Rp.1.607.473.400. penggunaan anggaran tersebut terbagi dalam tiga tahap dalam setahun.

Pemerintah Desa Bolli telah melakukan pembangunan infrastruktur baik infrastruktur jalan maupun infrastruktur pertanian. Untuk pembangunan infrastruktur jalan di Desa Bolli telah memperbaiki jalan Desa seperti pembuatan jembatan dan pengerasan jalan khusus yang belum aspal untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan akses kewilayah Desa lain dan akses menuju kewilayah administratif kecamatan. Pembangunan infrastruktur pertanian,

pemerintah DesaBolli telah membuat irigasi untuk memudahkan petani dalam pengairan pertanian dan pembuatan jalan tani untuk akses menuju persawahan dan perkebuna. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah DesaBolli telah memberikan modal bantuan kepada usaha kecil yang ada di DesaBolli. Selain itu masyarakat DesaBolli di bagikan bibit pertanian untuk meningkatkan hasil panen masyarakat.

Namun pembangunan infrastruktur di DesaBolli masih belum maksimal, akses jalan poros Desa masih kurang memadai, jalannya masih banyak yang rusak dan berlubang dimana saat hujan jalan akan tergenang air. Selain itu sumber air bersih di DesaBolli masih mengandalkan sumur galian warga karena pemerintah DesaBolli belum menyediakan air pam, Padahal kedua hal tersebut dapat dikatakan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak, jika jalan rusak akan menghambat aksesibilitas masyarakat Desa, hal ini juga menjadi faktor yang menghambat peningkatan ekonomi.

Dari observasi di lapangan menunjukkan bahwa DesaBolli dinilai belum maksimal dalam mengimplementasikan Dana Desa karena terlalu fokus dalam pembangunan infrastruktur jalan sedangkan masih banyak kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak, pemerintah DesaBollimengabaikan kebutuhan masyarakat yang dinilai sangat urgen dalam kebutuhan sehari-hari, di antaranya kebutuhan air bersih disebagian Dusun masih belum ada sumber air bersih. Dalam pemberdayaan masyarakat di DesaBolli tidak terlalu dapat perhatian dari pemerintah Desa, beberapa alasan yang mendasari hal tersebut yaitu tidak maksimal dalam melakukan pelatihan dan kurangnya partisipasi masyarakat disegala bidang sehingga budaya gotong royong terabaikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu di perhatikan lagi apa yang benar-benar menjadi prioritas yang di butuhkan oleh Desa, sehingga dapat tepat sasaran untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah di tetapkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Dana Desa digunakan berdasarkan prioritas, dimana dalam penggunaan Dana Desa di awasi oleh semua pihak baik dari pemerintah daerah, pemerintah Desa maupun semua elemen masyarakat.

Melihat besarnya dana yang di salurkan pemerintah pusat untuk Desa, banyak diperbincangkandari kalangan pejabat eksekutif dan legislatif sampai dengan masyarakat Desa, disisi lain banyak kontroversi yang terjadi karena masih banyak Desa yang tidak menggunakan Dana Desa secara maksimal dalam menginplentasikannya dan disisi positifnya banyak Desa yang mandiri berkat besarnya dana yang diterima setiap tahunnya bahkan bisa menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Pemaparan tersebut melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “ Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis di atas, maka drumuskan pertanyaan penelitian:

1. Apa saja perencanaan penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan di DesaBolli Kecamatan PonreKabupaten Bone?
2. Bagaimana Implementasi Dana Desa dalam pembangunan di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone?

3. Bagaimana Evaluasi Dana Desa dalam pembangunan di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perencanaan penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui implementasi Dana Desa dalam pembangunan di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.
3. Untuk mengetahui evaluasi implementasi Dana Desa dalam pembangunan di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan agar memberikan sumbangan pengetahuan terhadap pengembang ilmu administrasi publik, khususnya implementasi Dana Desa dalam pembangunan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah Desa

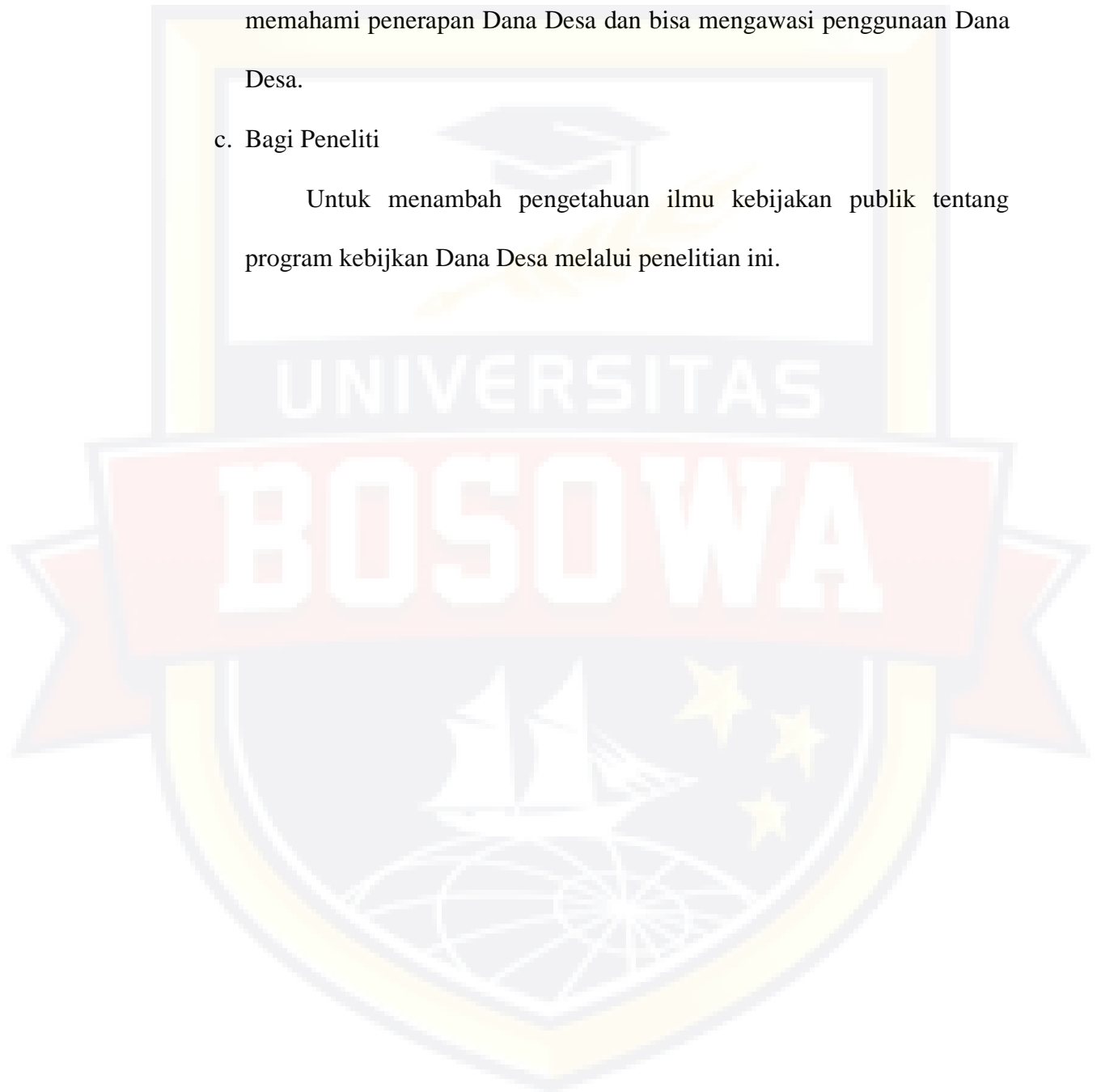
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah Desa dalam menerapkan Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan demi kemajuan Desa.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberi pengetahuan terhadap masyarakat dalam memahami penerapan Dana Desa dan bisa mengawasi penggunaan Dana Desa.

c. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan ilmu kebijakan publik tentang program kebijakan Dana Desa melalui penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan secara fundamental merupakan teknik atau metode untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang ada. Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan adalah teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang terkait dengan perencanaan. Sedangkan tujuan pembangunan pada dasarnya merupakan dorongan atau proses pembangunan secara efektif dan efisien guna mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Perencanaan Pembangunan menurut Arthur W. Lewis (1965) adalah Suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif. Rangsangan tersebut diberikan dalam bentuk insentif ekonomi baik secara mikro maupun makro yang dapat mendorong penggunaan sumberdaya secara lebih produktif sehingga proses pembangunan akan menjadi lebih baik.

Siagian (2016) bahwa perencanaan merupakan langkah pertama yang harus dijalankan kegiatan dalam menjalankan kebijakan publik. Perencanaan suatu proses yang matang serta penentuan program kegiatan

yang akan dilakukan dimasa yang akan datang, perencanaan pada hakikatnya adalah suatu keputusan.

Kemudian M.L. Jhingan (1984) seorang ahli perencanaan pembangunan bangsa India. Bahwa Perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan Sengaja oleh suatu pemerintah pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.

Lincoln Arsyad (2001) menguraikan perencanaan pembangunan berdasarkan jangka waktunya, yaitu:

a. Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan pembangunan jangka panjang mencakup durasi 10-25 tahun. Pada era demokrasi, Sedangkan rencana Pembangunan Jangka Panjang, baik nasional atau daerah mencakup durasi 20 tahun. Jenis perencanaan pembangunan yang mempunyai jangka waktu 10 tahun, seperti Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Rencana jangka panjang biasa disebut sebagai perencanaan perspektif (Perspective Planning) yang berisikan arah pembangunan secara umum.

b. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan pembangunan jangka menengah mencakup durasi 4-5 tahun, tergantung dan masa jabatan presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai durasi 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional atau pemerintah

daerah. Perencanaan jangka menengah pada dasarnya merupakan jabaran rencana jangka panjang sehingga bersifat operasional.

c. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan pembangunan jangka pendek biasanya mencakup durasi 1 tahun, sehingga sering dikatakan sebagai rencana tahunan (Annual Planning). Perencanaan tahunan ini bersifat operasional karena didalamnya terdapat program dan kegiatan yang lengkap dengan pendanaannya. Bahkan dalam rencana tahunan ini termasuk juga indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan dan menjadi dasar utama penyusunan anggaran baik APBD atau APBN.

2. Implementasi Pembangunan

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan. Menurut Deddy Mulyadi (2018:45) implementasi merupakan tindakan yang dilakukan setelah kebijakan publik ditetapkan, untuk mencapai tujuan ataupun sasaran yang ingin dicapai.

Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.

2) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan

3) Unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Untuk kebijakan sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

George C.Edwards III (2004), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:.

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi

kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standard operating procedures. Standard Operating Procedures menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

3. Evaluasi

Evaluasi kebijakan publik menurut Deddy Mulyadi (2018:121) merupakan salah satu tahapan dalam analisis kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai secara keseluruhan bahwa suatu kebijakan publik yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan itu berhasil mencapai tujuan, sasaran dan dampak secara optimal bagi kepentingan bersama. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kebijakan publik dimana selanjutnya akan dilakukan perbaikan jika terdapat masalah atau rendahnya nilai yang dicapai.

Siagian (2005:45) mendefenisikan evaluasi sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Evaluasi merupakan langkah akhir dalam formulasi kebijakan publik untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dan untuk mengetahui apakah tujuan yang ingin dicapai sebelumnya terlaksana atau tidak.

4. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya yang ada dengan berbagai proses pelaksanaan untuk menanggulangi masalah yang dialami publik. Menurut Deddy Mulyadi (2018:37) kebijakan publik adalah merupakan suatu proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan saling terkait yang dilakukan oleh pemerintah dengan *stakeholder* dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik.

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan berlangsung dalam suatu kebijakan tertentu.

Kebijakan publik dalam arti luas yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut dengan konvensi-konvensi. Contoh dari kebijakan publik ini yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan/keputusan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan/keputusan gubernur dan keputusan peraturan/keputusan bupati.

a. Aktivitas Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Efektivitas suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang melibatkan tahapan-tahapan dan variabel-variabel. Terdapat sebelas aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan proses kebijakan yaitu: *perception/defenition, aggregation, organization, representation, agenda setting, formulation, legitimation, budgeting, implementation, evaluation and adjustment/termination.*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan
- 2) Implementasi kebijakan
- 3) Pengawasan dan penilaian hasil pelaksanaan kebijakan.

Jadi efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi dan evaluasi. Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai.

b. Tingkatan kebijakan publik

Dalam peraturan tertulis, tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan menjadi falsafah dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik

Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan produk pendiri bangsa Indonesia.

- 2) Kebijakan publik yang kedua adalah dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan legislatif namun menyiratkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislatif bekerja sendiri
- 3) Kebijakan publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena produk dari legislatif berisikan peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana yang dibuat sebagai turunan dari produk peraturan legislatif.

Kebijakan secara umum menurut Zainal Abidin (2004: 31-33) dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu:

- 1) Kebijakan umum yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Contoh, kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasional, wewenang: presiden bersama dengan DPR dan DPD dan bentuk: undang-undang dasar dan perpu.
- 2) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan

suatu undang-undang. Contoh, kebijakan presiden sebagai pelaksana undang-undang, TAP MPR dan perpu, wewenang: presiden, bentuk: peraturan/keputusan presiden.

- 3) Kebijakan teknis yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan. Contoh, sebagai penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas dibidang tertentu, wewenang: menteri, bentuk: keputusan, peraturan dan instruksi pejabat tertentu.

Kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada strata strategi. Oleh sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan keputusan-keputusan khusus di bawahnya.

a. Analisis SWOT

SWOT adalah singkatan dari lingkungan *Internal Strengths* dan *Weaknesses* serta lingkungan eksternal *Opportunities* dan *Threats* yang dihadapi dunia bisnis. Kottler (2009: 63) memberikan kesimpulan mengenai SWOT:

1. Kekuatan (*Strength*)
 - a. Pengalaman dan pandangan industri yang mendalam
 - b. Desainer produk yang kreatif tetapi praktis
 - c. Penggunaan model bisnis yang sangat efisien dan fleksibel dengan memanfaatkan penjualan dan distribusi pelanggan langsung.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Ketergantungan terhadap modal luar yang diperlukan untuk menumbuhkan bisnis.
- b. Kurangnya pengecer yang dapat bekerja tatap muka dengan pelanggan untuk menghasilkan kesadaran merek dan produk.
- c. Kesulitan mengembangkan kesadaran merek (*brand awareness*) sebagai perusahaan yang baru berdiri.

3. Peluang (*Opportunity*)

- a. Partisipasi dalam industri yang sedang tumbuh
- b. Penurunan biaya produk melalui skala keekonomisan
- c. Kemampuan untuk mendongkrak usaha pemasaran peserta industri lain untuk membantu menumbuhkan pasar umum.

4. Ancaman (*Threat*)

- a. Persaingan masa depan/potensial dari peserta pasar yang sudah mapan
- b. Penurunan ekonomi yang bisa memberi dampak negatif pada pengeluaran orang dari pendapatan bebas untuk produk kebugaran/rekreasional
- c. Peluncuran hasil studi yang mempertanyakan keamanan berseluncur atau ketidakmampuan kita mencegah trauma besar yang diakibatkan berseluncur.

Rangkuti (2013: 19) mengemukakan bahwa analisis SWOT adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi

perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategis (*strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah Analisis SWOT.

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi lingkungan internal (*Strength* dan *Weaknesses*) dan lingkungan eksternal (*Opportunity* dan *Threat*) untuk dapat menentukan strategi yang akan diambil. “Analisis SWOT adalah satu pekerjaan yang cukup berat karena hanya dengan itu alternatif-alternatif stratejik dapat disusun” J.Salusu, (2006: 350).

Analisis SWOT menjadi alat untuk menentukan langkah yang akan diambil suatu organisasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang untuk dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman. “Kegagalan analisis SWOT berarti gagal dalam mencari relasi dan titik temu antara faktor-faktor stratejik dalam lingkungan internal dan yang terdapat dalam lingkungan eksterna” (J.Salusu, 2006: 350).

Analisis SWOT sangat menentukan kebijakan yang akan diambil. Penentuan atau pengambilan kebijakan strategik yang baik dapat dilakukan apabila dalam menganalisis SWOT sesuai dengan situasi dan kondisi yang dikaji secara mendalam. Data yang diperoleh suatu organisasi akan di analisis SWOT untuk mendapatkan strategi yang selaras dengan tujuan organisasi.

Salah satu model analisis SWOT yang diperkenalkan oleh Kearns dalam J.Salusu (2006:356) seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 : Analisis SWOT, Klasifikasi Isu

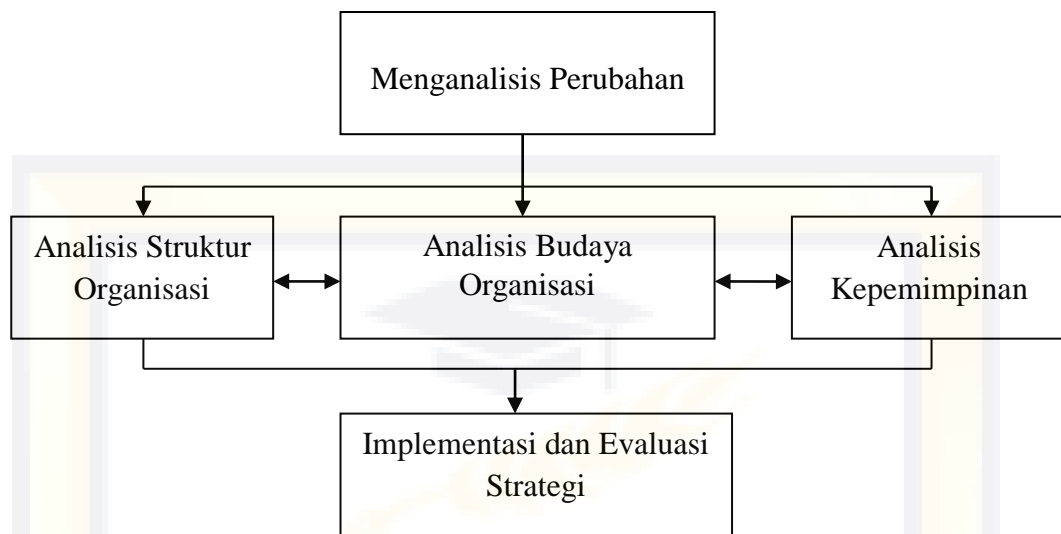
Faktor eksternal	<i>Opportunities</i>	<i>Threats</i>
Faktor internal	<i>Comparative Advantage</i>	<i>Mobilization</i>
<i>Strengths</i>	<i>Comparative Advantage</i>	<i>Mobilization</i>
<i>Weaknesses</i>	<i>Investment/ Divestment</i>	<i>Damage Control</i>

Tabel diatas menggambarkan beberapa kemungkinan terjadinya suatu pengambilan kebijakan strategi. *Comparative Advantage* merupakan kondisi yang sangat memungkinkan pengambil keputusan untuk mendapatkan strategi yang paling baik. Pada kondisi ini tidak boleh dibiarkan oleh organisasi karena memungkinkan untuk perkembangan organisasi dengan cepat yang memanfaatkan kekuatan dan peluang secara optimal. *Mobilization*, dalam pertemuan antara

kekuatan dan ancaman merupakan hal yang berlawanan sehingga diperlukan pergeseran (*mobilization*) sumberdaya yang ada di organisasi (*Strength*) untuk dapat menekan atau meminimalisir ancaman yang terjadi kepada organisasi. *Investment/Divestment* merupakan pertemuan antara kelemahan dan peluang yang memberikan gambaran pada organisasi secara kurang jelas. Peluang yang sangat menjanjikan tidak diimbangi dengan kekuatan yang sepadan sehingga organisasi memungkinkan untuk tidak mengambil peluang yang ada atau melimpahkan kepada organisasi lain karena kelemahan untuk menggarap peluang yang terjadi`.

Terakhir adalah pertemuan antara kelemahan dan ancaman. Keduanya sangat berbahaya bagi organisasi karena akan menghambat bahkan menghancurkan organisasi dari dalam dan luar organisasi. Organisasi harus dapat membenahi sedikit demi sedikit internalnya agar dapat menahan ancaman dari luar sehingga dampak pertemuan kedua ini tidak separah yang diprediksikan.

Formulasi strategi yang telah dirumuskan maka selanjutnya adalah implementasi strategi, bagaimana strategi itu dilaksanakan dalam lapangan. Proses implementasi menurut Cetroni dan Peter dalam Setiawan Hari Purnomo dan Zulkieflimansyah (1999: 87)



Gambar 2. 1 : Model Proses Implementasi Strategi

Gambar di atas terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan implementasi yaitu dimulai dari menganalisis perubahan. “Perubahan yang dianalisis dalam tahap ini di pandang sebagai sebuah proses perubahan dari yang sangat sederhana seperti tidak adanya variasi dalam strategi sampai kepada perubahan yang sangat kompleks dalam misi organisasi, yang mempertanyakan kembali esensi organisasi.” Setiawan Hari Purnomo dan Zulkieflimansyah, (1999: 87)

Analisis struktur organisasi merupakan analisis kedua dalam implementasi strategi. Analisis struktur organisasi ada yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Struktur organisasi yang formal yaitu struktur organisasi yang mewakili hubungan antara sumber daya yang dirancang oleh pihak manajemen dan biasanya disampaikan dalam bentuk bagan.
- b. Struktur organisasi yang tidak formal yaitu struktur organisasi yang mewakili hubungan sosial berdasarkan persahabatan atau kepentingan bersama di antara anggota-anggota organisasi. (Setiawan Hari Purnomo dan Zulkieflimansyah, 1999: 89)

Tahapan selanjutnya dalam proses implementasi strategi adalah analisis budaya organisasi. Organisasi itu tidak hanya sekedar struktur yang tergambarkan lewat bagan namun budaya organisasi yang mengimplementasikan strategi. “Budaya organisasi merupakan komponen yang menyebabkan mengapa suatu strategi dapat diimplementasikan pada suatu organisasi, sementara strategi tersebut gagal untuk diimplementasikan pada organisasi yang lain dengan kondisi yang relatif sama.”(Setiawan Hari Purnomo dan Zulkieflimansyah, 1999:96).

Analisis kepemimpinan merupakan salah satu tahapan dalam proses implementasi. Implementasi strategi biasanya bersinggungan dengan perubahan maka tidaklah mengherankan kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dan perlu. Setiap pemimpin dan gaya kepemimpinan akan menentukan keputusan yang akan diambil oleh organisasi. “Apapun gaya kepemimpinan yang dianut oleh manajemen organisasi, dalam turbulensi lingkungan seperti sekarang ini, setiap pemimpin harus siap dan dituntut untuk melakukan transformasi.” Setiawan Hari Purnomo dan Zulkieflimansyah, (1999: 99)

Implementasi dan evaluasi strategi merupakan tahapan akhir. Hal ini, organisasi harus memiliki gagasan yang jelas mengenai perubahan yang diinginkan tentang struktur organisasi, budaya organisasi, dan kepemimpinan. Implementasi strategi yang dilakukan oleh organisasi sesuai dengan strategi yang telah diformulasikan, maka implementasi

diperlukan pengendalian implementasi strategi. Hal ini untuk menjaga agar strategi agar tetap pada jalurnya.

b. Konsep Pelayanan Publik

1. Defenisi pelayanan publik

Pelayana publik adalah usaha pemerintah dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Pelayanan publik menurut Lonsdale dalam deddy (2018: 189) ialah segala sesuatu yang di sediakan oleh pemerintah atau swasta karena umumnya masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri kecuali secara kolektif dalam rangka memenuhi kesejahteraan sosial seluruh masyarakat.

Moenir (1998: 40) mengungkapkan bahwa pelayanan publik yaitu: Hak atas pelayanan itu sifatnya sudah universal berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu dan organisasi apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, maka pada tanggal 18 Juli 2009 Indonesia mensahkan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menurut Undang-Undang tersebut, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik dilakukan untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, karena itu penyelenggaraannya secara niscaya membutuhkan asas-asas pelayanan. Dengan kata lain, dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik.

2. Proses pelayanan publik

Ada empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu (Bharata, 2004:11):

- a) Penyedia Layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*) atau jasa-jasa (*services*).
- b) Penerima Layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (*costumer*) atau costumer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
- c) Jenis Layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
- d) Kepuasan Pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan

yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang atau jasa yang mereka nikmati.

3. Prinsip-prinsip Reformasi Pelayanan Kelas Dunia

- a) Nilai-nilai luhur pelayanan publik yaitu dasar perilaku pejabat publik yang baik adalah pengabdian, niat yang tulus untuk mengelola pelayanan pada masyarakat serta mendukung dan mendorong pihak lain yang memberikan pelayanan masyarakat.
- b) Rintangan yang sulit artinya para pemimpin pelayanan harus dibiasakan memberikan kesempatan pada bawahannya untuk belajar mengatasi kesulitan serta melakukan hal terbaik dalam melaksanakan perubahan dan inovasi.
- c) Manajemen perubahan artinya untuk mewujudkan reformasi birokrasi harus dimulai dari reformasi individu dan membutuhkan dukungan pendongkrak perubahan yang akan mendorong untuk berubah (reformasi)
- d) *Best Value* artinya harus mampu memberi nilai terbaik yang diwujudkan melalui pelayanan publik terbaik (berkualitas)
- e) Pemimpin organisasi sebagai pelayan publik dan memotivasi bawahannya artinya setiap pemimpin birokrasi harus mampu menentukan *core* bisnisnya sebagai fungsi pelayanan dengan perspektif baru berdasarkan prinsip nilai-nilai terbaiknya (*Best Value*) sesuai dengan kriteria dan prinsip pelayanan yang dikenal luas/internasional.

- f) Perencanaan strategis individu artinya para pemimpin birokrasi pelayanan bersama-sama dengan anggotanya wajib menyusun renstra strategis individu sebagai pejabat pelayanan agar jelas system kerja dan tujuan yang dicapainya.
- g) Aparatur professional menjadi tulang punggung pelaksanaan reformasi birokrasi.
- h) Petunjuk operasional kegiatan yaitu ukuran pencapaian kinerja sebagai bentuk operasional seperti DIPA/RPPA dll.
- i) Pelaksanaan reformasi birokrasi melalui perbaikan secara menyeluruh untuk meningkatkan manfaat yang besar bagi masyarakat.
- j) Analisis perundang-undangan atau kebijakan.
- k) Kemitraan artinya perlu dibina untuk ikut serta meningkatkan kinerja pelayanan.

c. Perencanaan kebijakan publik

1. Pengertian perencanaan

Perencanaan merupakan langkah pertama yang harus dijalankan kegiatan dalam menjalankan kebijakan publik. Perencanaan suatu proses yang matang serta penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, perencanaan pada hakikatnya adalah suatu keputusan. Siagian (2016:88) mendefenisikan perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Melihat pengertian yang diberikan diatas, menjadi jelas bahwa rencana adalah satu keputusan. Karena rencana adalah satu keputusan maka kegunaannya baru akan terlihat setelah dilaksanakan. Rencana belum berarti banyak meskipun berhasil dibuatnya suatu rencana yang baik sudah merupakan bagian penting dari proses kebijakan publik.

Pengertian diatas menunjukkan dengan jelas bahwa kiranya benar, apabila perencanaan ditempatkan sebagai fungsi organik pertama dari kebijakan publik. Alasannya ialah bahwa tanpa adanya rencana maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam usaha pencapaian tujuan. Perencanaan menjadi fungsi organik pertama karena merupakan dasar dan titik tolak bagi kegiatan pelaksanaan selanjutnya.

Menurut Hafied Cangara (2014:25) dalam perencanaan ada dua belas pokok pikiran yang terkandung didalamnya, yakni:

- 1) Perencanaan sebagai usaha yang disengaja, dan dilakukan secara sadar.
- 2) Perencanaan menempatkan manusia sebagai modal dasar dalam menggerakkan setiap usaha
- 3) Perencanaan menggunakan hasil riset, data, dan informasi
- 4) Ada tujuan yang ingin dicapai, sehingga memerlukan keputusan dan tindakan yang akan diambil
- 5) Ada keinginan untuk melakukan perubahan
- 6) Berorientasi masa depan (optimis)

- 7) Pemecahan masalah
- 8) Pemilihan alternatif
- 9) Pengalokasian sumber daya *socio- technical*
- 10) Menjadi dasar acuan pelaksanaan
- 11) Menjadi pengendalian dan monitoring pelaksanaan
- 12) Perencanaan sebagai proses yang berkelanjutan.

Dari dua belas pokok-pokok pikiran diatas dapat disimpulkan bahwa kapan seseorang membuat perencanaan berarti ia menetapkan apa yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan, siapa yang akan mengerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

2. Fungsi perencanaan

Perencanaan merupakan satu unsur yang sangat penting sesudah unsur organisasi. Perencanaan merupakan titik awal dari sebuah kebijakan publik sebelum kebijakan itu dikerjakan. Oleh sebab itu Hafid Cangara (2014: 25) merumuskan perencanaan dibuat agar berfungsi untuk:

- a) Mengidentifikasi dan menetapkan masalah
- b) Memberi arahan (fokus) atau pedoman pada tujuan yang ingindicapai, terutama dalam mengatasi ketidakpastian dengan memilih jalan yang terbaik. Bahkan dalam keadaan stabil pun perencanaan masih diperlukan.
- c) Meminimalisasi terjadinya pemborosan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan secara efektif.

- d) Melakukan perkiraan (*forecasting*) terhadap kendala yang mungkin terjadi dan hasil (*output*) yang akan diperoleh.
- e) Melakukan pengendalian agar pelaksanaan senantiasa tetap berada dalam koridor perencanaan yang telah ditetapkan.
- f) Memberi kesempatan untuk memilih alternatif terbaik guna mendapatkan hasil yang lebih baik.
- g) Mengatasi hal-hal yang rumit dengan mencari jalan keluar (*solution*) dari masalah yang dihadapi.
- h) Menetapkan skala prioritas tentang apa yang harus dikerjakan lebih dulu.
- i) Penetapan mekanisme pemantauan (*monitoring*) dan instrumen alat ukur untuk keperluan evaluasi.

3. Tipe Perencanaan

Perencanaan dapat dilihat dari berbagai perspektif serta ruang lingkup yang dicapainya. Hafied Cangara (2014: 26-19) menggolongkan perencanaan dalam beberapa bentuk atau tipe, yaitu:

- a) Perencanaan menurut substantif
 - 1) Perencanaan Ekonomi (*Economic Planning*) ialah perencanaan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi.
 - 2) Perencanaan Sosial ialah perencanaan yang berorientasi pada segi-segi kehidupan sosial masyarakat.
 - 3) Perencanaan Fisik ialah (*Physical Planning*) ialah perencanaan yang berorientasi pada aspek fisik.

b) Perencanaan menurut tingkatan

- 1) Perencanaan makro ialah perencanaan yang dijabarkan pada tingkat nasional yang sifatnya umum dan memerlukan penjabaran lebih lanjut.
- 2) Perencanaan meso ialah perencanaan yang didasarkan pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat makro lalu dijabarkan secara rinci ke dalam program-program yang berdimensi lebih kecil.
- 3) Perencanaan mikro ialah perencanaan yang dijabarkan secara rinci pada subsektor.

c) Perencanaan menurut ruang lingkup

- 1) Perencanaan strategik ialah perencanaan yang berhubungan dengan proses penetapan tujuan, dimana keputusan-keputusan yang dibuat didasarkan atas kepentingan negara atau institusi.
- 2) Perencanaan manajerial ialah perencanaan yang mengarahkan jalannya pelaksanaan sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
- 3) Perencanaan operasional ialah perencanaan yang dilakukan di lapangan, lebih spesifik dan memberi petunjuk secara konkret bagaimana seharusnya proyek dilaksanakan sesuai dengan aturan atau pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya.

d) Perencanaan menurut sistem desain

- 1) Perencanaan perbaikan ialah suatu rencana yang ditujukan untuk memperbaiki jalannya sistem tanpa menambah atau mengurangi komponen yang ada.
- 2) Perencanaan pengembangan ialah perencanaan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas suatu usaha dalam arti peningkatan luaran (*output*) dengan cara menambah atau mengurangi komponen yang ada.

e) Perencanaan menurut lingkup teritorial

- 1) Perencanaan wilayah ialah suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar batasan wilayah dan geografis.
- 2) Perencanaan daerah ialah wilayah yang diartikan sebagai suatu teritorial dimana batasan dan cirinya didasarkan pada wewenang administratif yang ditentukan dengan peraturan perundangan tertentu.
- 3) Perencanaan kawasan ialah wilayah teritorialnya didasarkan menurut batasan fungsional.

f) Perencanaan menurut jangka waktu

- 1) Perencanaan jangka pendek ialah perencanaan yang memerlukan waktu penyelesaian program antara 1 sampai 3 tahun.
- 2) Perencanaan jangka menengah ialah perencanaan yang memerlukan waktu penyelesaian program antara 4 sampai 10 tahun.

3) Perencanaan jangka panjang ialah perencanaan yang memerlukan waktu penyelesaian program antara 10 sampai 24 tahun.

g) Perencanaan alternatif

1) Perencanaan komitmen ialah suatu perencanaan yang digunakan untuk sebuah lingkungan perubahan yang pasti terjadi dimana variabel-variabelnya bisa dikendalikan.

2) Perencanaan kontingen (kemungkinan) ialah suatu perencanaan yang digunakan jika perubahan yang kita inginkan tidak tentu tetapi bisa terkendali atau sebaliknya sudah pasti tapi tidak bisa terkendali.

3) Perencanaan responsif ialah perencanaan yang digunakan untuk sebuah perubahan yang tidak tentu dan tidak terkendali sehingga diperlukan usaha untuk mendengar lebih banyak.

4. Pendekatan terhadap fungsi perencanaan kebijakan publik

Proses perencanaan dapat ditinjau dari tiga segi. Dengan kata lain, fungsi perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik melalui tiga cara yaitu Mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri suatu rencana yang baik. Setelah ciri-ciri itu diketahui lalu diusahakan, agar rencana yang dibuat memenuhi syarat itu. Adapun ciri-ciri tersebut ialah sebagai berikut:

a) Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

b) Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tujuan organisasi.

- c) Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami teknik-teknik perencanaan.
- d) Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang diteliti.
- e) Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
- f) Rencana harus bersifat sementara.
- g) Rencana harus luwes.
- h) Di dalam rencana terdapat tempat pengambilan resiko.
- i) Rencana harus bersifat praktis (pragmatis)
- j) Rencana harus merupakan forecasting.

Apabila pimpinan organisasi memahami dengan sungguh-sungguh makna dari kesepuluh prinsip perencanaan itu dan berusaha menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam menjalankan fungsi perencanaan maka dipastikan dapat berhasil dalam merumuskan suatu rencana yang baik.

5. Memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab dengan memuaskan.

Rudyard Kipling seorang sastrawan Inggris yang terkenal pernah mengatakan bahwa ia mempunyai enam pelayanan yang baik yaitu. *What, Where, When, How, How* dan *Why*.

Para ahli administrasi telah merumuskan konsep itu dan menerapkannya dibidang administrasi dalam hal ini dibidang perencanaan. Pertanyaan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kegiatan-kegiatan apa yang harus dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya?

b) Dimana kegiatan-kegiatan tertentu hendak dijalankan?

Pertanyaan ini mencakup letak bangunan organisasi yang hendak dijalankan, tata ruang yang disusun, tempat pelanggan yang hendak dilayani, tempat sumber tenaga kerja, sumber bahan-bahan yang diperlukan, tempat himpunan alat-alat serta perlengkapan lainnya.

c) Kapan kegiatan-kegiatan tertentu hendak dilaksanakan? Dalam perencanaan harus tergambar sistem prioritas yang akan dipergunakan, penjadwalan waktu, target tahap tertentu yang akan dicapai serta hal-hal lain yang berkaitan dengan faktor waktu.

d) Bagaimana cara melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan?

Pertanyaan ini menyangkut soal sistem dan tata kerja, standar yang harus dipenuhi, cara pembuatan dan penyampaian laporan, dan cara mengelolah dokumen-dokumen yang timbul sebagai akibat pelaksanaan.

e) Siapa yang akan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan? Dalam perencanaan perlu ditetapkan siapa yang akan berperan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan perlu ditegaskan bagian-bagiannya dalam penempatan kerja, pembinaannya, pengupahannya dan penggajiannya.

f) Secara filosofis pertanyaan yang paling penting yaitu “mengapa”, penting karena pertanyaan ini ditujukan kepada kelima pertanyaan sebelumnya.

6. Memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan teknik ilmiah

Dalam menerapkan prinsip-prinsip pemecahan masalah dengan teknik-teknik ilmiah (*scientific techniques of problem solving*) pimpinan dapat menciptakan suatu rencana yang baik. Dengan kata lain, pembuatan suatu rencana dapat dipandang sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan sistematis, serta didasarkan pada tujuan atau langkah- langkah yang baik. Langkah-langkah tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Mengetahui sifat yang sebenarnya dari masalah yang dihadapi (*know the nature of the problem*)
- b) Pengumpulan data-data (*collecting data*)
- c) Penganalisan data-data (*analysis of the data*)
- d) Penentuan beberapa alternatif (*determination of several alternatives*)
- e) Memilih cara yang kelihatan terbaik (*selection of the seemingly best way from among alternatives*)
- f) Pelaksanaan (*execution*)
- g) Penilaian hasil yang dicapai (*evaluation of result*)

Dari ketiga cara pendekatan yang telah dipaparkan, pendekatan yang mana pun yang dipergunakan dalam rangka perencanaan, hasilnya akan tersusun suatu rencana yang baik.

d. Implementasi kebijakan publik

1. Pengertian implementasi kebijakan publik

Proses implementasi kebijakan publik berbeda dengan proses pembuatan kebijakan publik. Jika pembuatan kebijakan menggunakan proses logika *bottom up* yaitu proses yang diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan proses implementasi kebijakan publik menggunakan logika *top down* yaitu penurunan alternatif kebijakan yang abstrak menjadi suatu tindakan yang konkret untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Ripley dan Franklin (1982: 4) berpendapat bahwa:

“Impelementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”.

Istilah impelementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam deddy mulyadi (2018: 49).

“Terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi, yaitu administrasi publik dan ilmu politik. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun, pada akhir perang dunia ke II berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa ternyata agen-agen administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh mandat resmi, tetapi juga oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislatif dan berbagai faktor dalam lingkungan politis”.

Menurut pendapat Gordon dalam pasolong (2008: 58) yaitu:

“Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi”.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005:102) merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai.

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008: 142)

menyatakan bahwa ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan budaya sosial yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan pada level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik pada level yang dikatakan berhasil.

b. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan juga perlu diperhitungkan manakala

hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d. Sikap/ Kecendrungan (*disposition*) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang juga perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Karenaitu lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif juga perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan.

3. Pendekatan implementasi kebijakan publik

Menurut Zainal Abidin (2012: 155-157) terdapat pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, antara lain:

a) Pendekatan struktural

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan.

- *Planing of change* yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi.
- *Planing for change* yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.

b) Pendekatan prosedural/ manajerial

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, budgeting, supervision, atau programing, evaluation, review technique*). Yang paling dalam proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan.

c) Pendekatan kewajiban/ behavior

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi dan substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikannya.

d) Pendekatan politik

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

Implementasi dari suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan tepat yang mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat.

4. Aktivitas- aktivitas dalam tahap implementasi kebijakan publik

Menurut Winarno (2007: 144) :Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas yaitu:

“Merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program”.

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Aktivitas-aktivitas dalam tahap implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2003:156), adalah: Secara rinci

kegiatan dalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun berurutan sebagai berikut:

Tabel 2.2 :aktivitas-aktivitas tahap implementasi kebijakan

No.	Tahap	Isu Penting
1.	Implementasi Strategi (pra implementasi)	Menyesuaikan struktur dengan strategi
		Melembagakan strategi
		Mengoperasionalisasikan strategi
		Menggunakan prosedur untuk memudahan implementasi
2.	Pengorganisasian (Organizing)	Design organisasi dan struktur organisasi
		Pembagian pekerjaan dan design pekerjaan
		Integrasi dan Koordinasi
		Perekrutan dan penempatan sumberdaya manusia (<i>recruiting & staffing</i>)
		Hak, wewenang dan kewajiban
		Pendeglasian (sentralisasi dan desentralisasi)
		Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumberdaya manusia
3.	Penggerakan dan kepemimpinan	Efektivitas kepemimpinan
		Motivasi
		Etika
		Mutu
		Kerjasama tim
		Komunikasi organisasi
4.	Pengendalian	Negoisasi
		Design pengendalian
		Sistem informasi manajemen
		Pengendalian Anggaran dan Keuangan
		Audit

Sedangkan menurut Deddy Mulyadi (2018: 18) mengatakan ada tiga tahapan implementasi kebijakan publik yaitu:

- a) Tahap interpretasi: tahap penjabaran dan penerjemahan yang masih dalam bentuk abstrak menjadi serangkaian rumus yang sifatnya

teknis dan operasional. Hasil interpretasi berbentuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis.

- b) Tahap pengorganisasian: tahap pengaturan dan penetapan beberapa komponen pelaksanaan kebijakan yakni: lembaga pelaksana kebijakan, anggaran yang diperlukan, sarana dan prasarana, penetapan tata kerja dan penetapan manajemen kebijakan.
- c) Tahap aplikasi: tahap penerapan rencana implementasi kebijakan ke kelompok target atau sasaran kebijakan.

Wibawa (1994:2) mengemukakan tahap implementasi kebijakan dapat dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkret atau mikro.

5. Model implementasi kebijakan publik

Keberhasilan implementasi menurut Merille S. Grindle dalam Nugroho (2006: 634) dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi

kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b) Jenis manfaat yang dihasilkan
- c) Derajat perubahan yang diinginkan
- d) Kedudukan pembuat kebijakan
- e) Siapa pelaksana program
- f) Sumber daya yang dikerahkan.

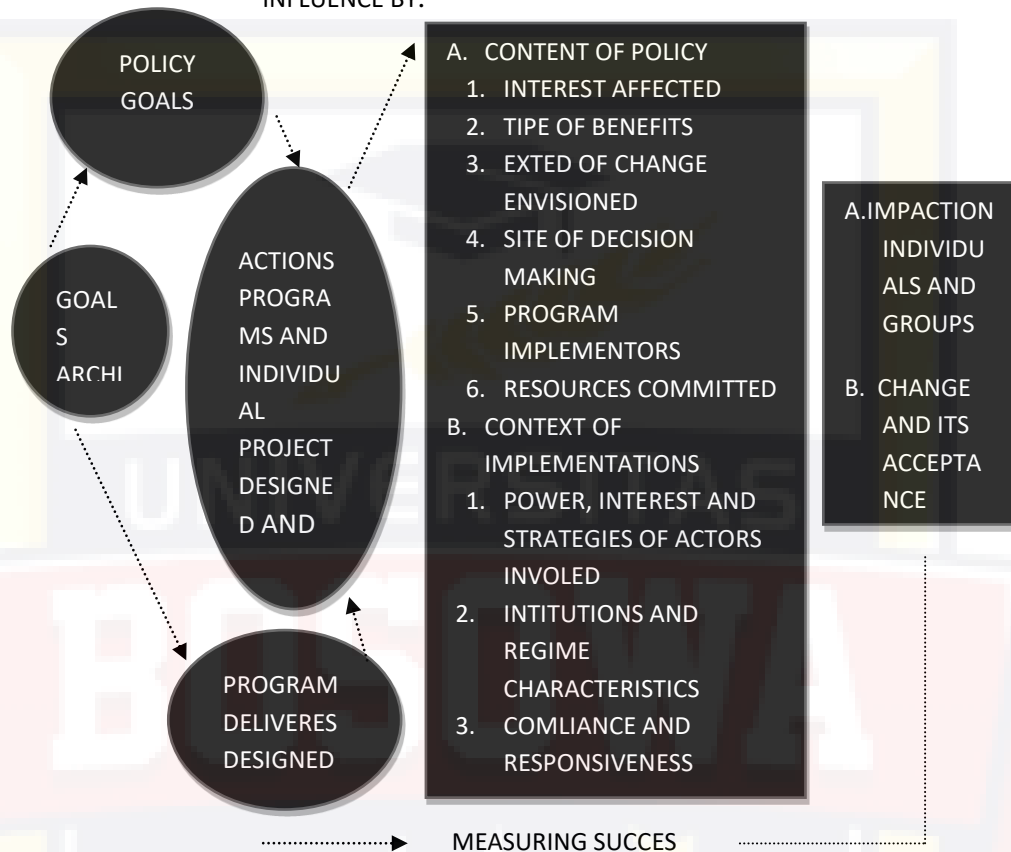
Sedangkan lingkungan kebijakan (*context implementation*) mencakup:

- a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Model Merile S. Grindle (1980)

FORMULATION POLICY IMPLEMENTING ACTIVITIES → OUTCOMES

INFLUENCE BY.



Gambar 2.2: Model Merile S. Grindle

Namun demikian, jika dicermati model Merile S. Grindle dapat dipahami bahwa keunikan model ini terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementator, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

5. Penilaian Kinerja Implementasi Kebijakan Publik

a. Kerangka Pengukuran Kinerja

Oxford english dictionary mendefinisikan kinerja sebagai: “*The accomplishment, execution, carrying out, working out of anything ordered or undertaken*”, dari definisi tersebut kinerja dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu tindakan, tugas atau operasi yang dilakukan oleh orang, kelompok orang atau organisasi (Purwanto, 2012: 99). Kinerja dengan demikian dapat merujuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) atau pencapaian (*accomplishment*). Jika dikaitkan dengan kebijakan, kinerja suatu kebijakan dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan suatu kebijakan. Baik itu berupa keluaran kebijakan (*policy output*), maupun hasil kebijakan (*policy outcome*). Dalam menentukan tinggi-rendahnya kinerja implementasi suatu kebijakan maka penilaian terhadap kinerja (*performance measurement*) merupakan suatu yang penting. Penilaian terhadap kinerja adalah penerapan metode yang dipakai oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan pokok dalam studi implementasi, yaitu: (1) apa isi dan tujuan dari suatu kebijakan: (2) apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut: dan (3) apakah setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan implementasi yang dijalankan tadi mampu mewujudkan tujuan kebijakan atau tidak.

b. Indikator Pengukuran Kinerja

Untuk dapat membuat justifikasi apakah suatu kebijakan gagal atau berhasil maka seorang peneliti perlu melakukan penilaian terhadap kinerja kebijakan tersebut. Alat bantu yang dapat dipakai oleh seorang peneliti untuk dapat menilai baik atau buruknya kinerja implementasi suatu kebijakan disebut sebagai indikator. Dalam kebijakan publik, indikator merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja suatu kebijakan. Dengan adanya indikator maka peneliti dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, program atau proyek. Sebagai alat ukur, indikator dapat bersifat kualitatif (naratif) maupun kuantitatif (angka). Angka atau deskripsi tersebut sangat berguna dalam menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Indikator yang baik akan membantu peneliti mengenali kondisi yang akan muncul ketika tujuan suatu kebijakan dapat diwujudkan.

Ciri-ciri indikator yang baik dalam teori kebijakan publik sebagaimana dijelaskan Purwanto (2012: 104) antara lain:

- 1) Memiliki relevansi dengan kebijakan atau program yang akan dievaluasi. Hal ini sangat jelas, indikator yang baik mesti mencerminkan realitas kebijakan dan program.

- 2) Memadai, dalam arti jumlah indikator yang digunakan memiliki kemampuan menggambarkan secara lengkap kondisi tercapainya tujuan suatu kebijakan.
- 3) Data yang diperlukan mudah diperoleh dilapangan sehingga tidak akan menyulitkan evaluator.
- 4) Indikator yang disusun idealnya bersifat general dan representatif serta dapat dibandingkan dengan kebijakan yang sama ditempat lain.

c. Indikator keluaran Kebijakan

Sebagaimana telah disebutkan dalam kerangka logis pengukuran kinerjaimplementasi suatu kebijakan didepan, indikator utama untuk mengukur kinerja dibedakan menjadi dua,yaitu: *indikator output* dan *indikator outcome*. Indikator output digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsidi dan lain-lain yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan. Untuk mengetahui kualitas hasil kebijakan yang diterima oleh kelompok sasaran, maka evaluator dapat merumuskan berbagai indikator. Menurut Purwanto (2012: 105) menjelaskan bahwa langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi *policy output* dari suatu kebijakan atau program yang akan dievaluasi.

2) Mengidentifikasi kelompok sasaran kebijakan atau program, apakah kelompok sasaran tersebut individu, keluarga, komunitas dan lain-lain.

3) Mengidentifikasi frekuensi kegiatan penyampaian *output* yang dilakukan oleh *implementer*.

4) Mengidentifikasi kualitas produk yang disampaikan oleh implementer kepada kelompok sasaran.

Secara umum apabila kebijakan atau program yang ingin dievaluasi tersebut merupakan kebijakan distributif, yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu anggota masyarakat atau kelompok masyarakat yang kurang beruntung melalui instrumen material seperti pelayanan gratis, subsidi, hibah dan lain-lain. Menurut Purwanto (2012:106) menjelaskan bahwa berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas hasil kebijakan adalah sebagai berikut:

1) Akses, indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran.

2) Cakupan (*coverage*), indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapatkan pelayanan, hibah, transfer dana dan sebagainya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan. Prosedur yang digunakan untuk mengukur cakupan adalah:

- Menetapkan siapa saja yang menjadi kelompok sasaran (keluarga miskin, petani, PNS dan sebagainya) idealnya evaluator memiliki data seluruh kelompok sasaran yang memiliki hak (*eligible*) untuk menjadi kelompok sasaran tersebut.
 - Membuat proporsi (perbandingan) jumlah kelompok sasaran yang sudah mendapatkan layanan terhadap kelompok total target.
- 3) Frekuensi, frekuensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program.
 - 4) Bias, bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan diberikan oleh implementer bias (menyimpang).
 - 5) *Service delivery* (ketepatan layanan), indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan implementasi suatu program dilakukan tepat waktu atau tidak. indikator ini sangat penting untuk menilai output yang memiliki sensitifitas terhadap waktu.
 - 6) Akuntabilitas, indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

7) Kesesuaian program dengan kebutuhan, indikator ini digunakan untuk mengukur apakah berbagai keluaran kebijakan atau program sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.

d. Indikator Hasil Kebijakan

Indikator kedua adalah *policy outcome*, yaitu untuk menilai hasilimplementasi suatu kebijakan. Dalam berbagai literatur, indikator *outcome* juga disebut sebagai indikator dampak kebijakan (*policy impact*). Berbagai perubahan yang muncul sebagai konsekuensi implementasi suatu kebijakan atau program tersebut perlu diukur untuk dapat diketahui sejauhmana kinerja implementasi kebijakan atau program. Menurut Purwanto (2012: 106) menjelaskan bahwa manfaat lain mengetahui dampak kebijakan adalah:

- 1) Untuk menguji implementasi suatu *pilot project* apakah dapat dikembangkan menjadi suatu program
- 2) Untuk menguji *design* suatu program yang paling efektif sehingga ditemukan suatu cara untuk mengintegrasikan berbagai program.
- 3) Untuk menguji apakah modifikasi suatu program membuahkan hasil atau tidak.

e. Evaluasi kebijakan publik

Umumnya ketika kita berbicara mengenai evaluasi kebijakan, asosiasi pikiran kita dihubungkan dengan perkiraan atau penaksiran atas kebijakan yang tengah diimplementasikan. Namun sebenarnya tidak

hanya itu. Evaluasi kebijakan sebenarnya juga membahas persoalan perencanaan, isi, implementasi, dan tentu saja efek atau pengaruh dari kebijakan itu sendiri.

1. Pengertian evaluasi kebijakan publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan proses penilaian terhadap apa yang dikerjakan dan apa yang telah dikerjakan untuk mengetahui nilai yang telah telah dicapai apakah sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak sehingga bisa kita lihat tercapainya tujuan atau tidak.

Dunn (1998:608) menyamakan evaluasi dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasilkebijakan dalam arti satuan nilai.

Menurut Zainal Abidin (2012:165), pengertian evaluasi secara lengkap mencakup tiga pengertian, yaitu (1) evaluasi awal, yaitu dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum diimplementasikan (*ex-ante evaluation*), (2) evaluasi dalam proses implementasi atau monitoring, (3) evaluasi akhir yang dilakukan setelah selesai proses implelementasi kebijakan (*ex-post evaluation*).

Dalam arti yang spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Sehingga tujuan evaluasi adalah untuk menilai secara keseluruhan pengaruh dan dampak pada akhir program, yang akan menjadi landasan untuk meningkatkan atau menyempurnakan berkenaan dengan program atau kebijakan

berikutnya. Menurut Zainal Abidin (2004:347) evaluasi akan menghasilkan informasi yang bersifat penilaian dalam memenuhi kebutuhan, peluang dan/atau memecahkan permasalahan.

2. Sifat evaluasi kebijakan publik

Sifat evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan menurut Dunn, (1998:610) yaitu:

- a) Fokus nilai, evaluasi ditujukan untuk pemberian nilai terhadap manfaat atau kegunaan dari suatu kegiatan, program atau kebijakan.
- b) Interdependensi fakta-nilai, hasil evaluasi tidak hanya tergantung pada bukti-bukti (fakta) tetapi juga terhadap nilai.
- c) Orientasi masa kini dan masa lalu, evaluasi mempersoalkan hasil sekarang dan masa lalu. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan di buat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).
- d) Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

3. Fungsi evaluasi kebijakan publik

Di dalam analisis kebijakan, evaluasi memiliki beberapa arti penting. Menurut Dunn (1998:612) fungsi utama dari evaluasi dalam analisis kebijakan adalah:

- a) Hal yang paling penting dari fungsi evaluasi adalah memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan.
- b) Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran.
- c) Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

4. Kriteria evaluasi kebijakan publik

Menurut Dunn (1998:611) terdapat enam kriteria yang dapat digunakan untuk menilai suatu kinerjaberhasil atau tidak berhasil, yaitu:

- a) *Effectiveness* atau keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
- b) *Efficiency* atau efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.
- c) *Adequacy* atau kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

- d) *Equity* atau kesamaan, yaitu erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial untuk menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berada dalam masyarakat.
- e) *Responsivennes* atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat.
- f) *Appropriatennes* atau ketepatangunaan, yaitu berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan suatu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

5. Pendekatan evaluasi kebijakan publik

Menurut Dunn (1998:613), ada beberapa pendekatan evaluasi kebijakan publik yaitu:

- a) Evaluasi semu (*pseudo evaluation*). Merupakan pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu atau kelompok masyarakat secara keseluruhan.
- b) Evaluasi formal (*formal evaluation*). Merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan

yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan atau administrator program.

c) *Decision theoretic evaluation*, adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

6. Masalah evaluasi kebijakan publik di Indonesia

Negara yang maju dan kuat seperti Jepang dan Amerika dikarenakan bangunan negara tersebut ditata dengan kebijakan publik yang sudah mengantisipasi ke masa depan. Kesalahan dalam kebijakan publik Indonesia dalam mengantisipasi krisis moneter sebelum reformasi digulirkan salah satu bukti nyata yang mengakibatkan keterpurukan Indonesia yang berkepanjangan setelah mengalami masa yang gilang gemilang sebelumnya. Indonesia pernah memiliki konsep pembangunan jangka panjang, namun kebijakan makro jangka panjang 25 tahunan tersebut tidak diisi dengan kebijakan mikro yang sesuai.

Evaluasi kebijakan publik menurut Winarno (2007: 237) merupakan proses yang rumit dan kompleks. Proses ini melibatkan berbagai macam kepentingan individu-individu yang terlibat dalam proses evaluasi. Kerumitan dalam proses evaluasi juga karena melibatkan kriteria-kriteria yang ditujukan untuk melakukan evaluasi. Ini berarti

bahwa kegagalan dalam menentukan kriteria akan menghambat proses evaluasi yang akan dijalankan.

Ada tiga permasalahan evaluasi kebijakan publik di Indonesia yaitu:

- a) Sering tidak sungguh-sungguh karena evaluatornya dari pemerintah sendiri
- b) Hasil evaluasi tidak konklusif, membahas banyak persoalan tetapi tanpa arah yang jelas, sehingga tak ada rekomendasi yang argumentatif
- c) Bersifat formalitas dari pada berdasarkan kebutuhan riil. Karena
- d) hanya dilakukan secara rutin maka hasilnya kurang tajam. Hanya untuk memenuhi formalitas, membaca data dan memasukkannya dalam form-form tertentu.

5. Pemerintah Desa

Didalam bahasa Sanskerta Desa memiliki pengertian sebagai, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran, dimana pengertian ini dapat dijadikan suatu pengertian yang dipandang dari sisi etimologi. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman,

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003: 3). Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi bagian terdepan dalam mencapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan Desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK. 07 /2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa memberi pengertian bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak dulu Indonesia telah ada satuan-satuan masyarakat kecil yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. (Bayu Suryaningrat; 1976: 4). Selanjutnya sesuai dengan perkembangan jaman Desa terus berkembang dan menjadi perhatian utama di banyak Negara-negara berkembang. Untuk itu pembangunan Desa mau tidak mau harus di laksanakan dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat. Lebih lanjut di katakan bahwa tujuan pembangunan masyarakat Desa adalah meningkatkan taraf penghidupan masyarakat Desa, berdasarkan asas kekuatan sendiri serta asas pemufakatan bersama antara anggota-anggota masyarakat Desa dengan bimbingan serta bantuan alat-alat pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan dalam rangka kebijaksanaan umum yang sama. Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas.

Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir

pada tahun 2000 bahwa sekitar 60 % atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman perDesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan Desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Selain itu Desa adalah salah satu *strong point* dalam percepatan pembangunan untuk berbagai tujuan pembangunan maupun penanggulangan kemiskinan. Untuk itu Desa perlu menjadi mandiri agar dapat memenuhi tujuan pembangunan, dan pengembangan anggaran Desa merupakan salah satu program untuk menjadikan Desa dapat membangun secara mandiri. Pembangunan Desa adalah dasar bagi pembangunan kota secara umum.

Bintarto (1983) Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan atau ketampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial, seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Selanjutnya.

Bintarto (1983) mengemukakan bahwa minimal ada tiga unsur utama Desa, yaitu sebagai berikut :

1. Daerah, dalam arti suatu kawasan perDesaan tentunya memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya.

2. Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya.
3. Tata Kehidupan, berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan karakteristik budaya lainnya.

Daldjoeni (2003) mendefinisikan Desa sebagai pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya beberapajiwa agraris. Ada juga ahli yang memberikan pengertian dari Desa merupakan suatu Kesatuan Masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri (Unang Sunardjo, 1984 : 11).

Dalam pengertian Desa menurut pemaparan yang telah disajikan di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada Desa.

Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan Desa yakni:

1. Faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga.
2. Faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat.
3. Faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun.
4. Faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan Desa.
5. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat.

6. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Faktor lain yang menjadi pendukung terbentuknya Desa yaitu terdapatnya pemerintahan Desa yang bertugas untuk mengatur seluruh aspek dan kegiatan yang memiliki kaitan dengan Desa. Adapun pengertian dari Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Adapun Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003: 3) dalam bukunya Pemerintahan Desa diartikan sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa yaitu kepala Desa dan perangkat Desa.

a. Konsep Pembangunan Desa

1. Pengertian pembangunan Desa

Pembangunan Desa di tujukan untuk segenap masyarakat, dengan demikian pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Desa. Pembangunan Desa bukanlah terfokus dalam suatu bidang saja, akan tetapi harus seimbang, serasi dan mencakup segala bidang. Jelasnya di katakan bahwa keseluruhan kegiatan pembangunan yang mengembangkan swadaya gotong royong. Pembangunan Desa adalah suatu pembangunan yang di arahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Berkenaan dengan pembangunan Desa, Daeng Sudirwo, (1981:63) mendefinisikan Pembangunan Desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di Desa.

Dengan demikian, maka pembangunan Desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan Desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan Desa itu, pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan Desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

2. Ciri-ciri dan Prinsip Pembangunan Desa

Pembangunan Desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian Desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan Desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam merealisasikan pembangunan Desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan Desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil, (1983:251) yaitu:

- a) Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat.
- b) Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat, Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan peDesaan termasuk Desa-Desa di wilayah kelurahan.
- c) Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan peDesaan termasuk Desa-Desa di wilayah kelurahan.
- d) Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah peDesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.
- e) Menggerakkan partisipasi, prakaras dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu. Jadi di dalam merealisasikan pembangunan Desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan Desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan.

Pembangunan Desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

b. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja

daerah kabupaten atau kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dana Desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN, hal ini menunjukkan rekognisi Negara kepada Desa.

Adapun filosofi dari Dana Desa ialah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa melalui peningkatan pelayanan publik di Desa, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan.

2. Esensi undang-undang Desa dan Dana Desa

a) Asas Pengaturan Desa

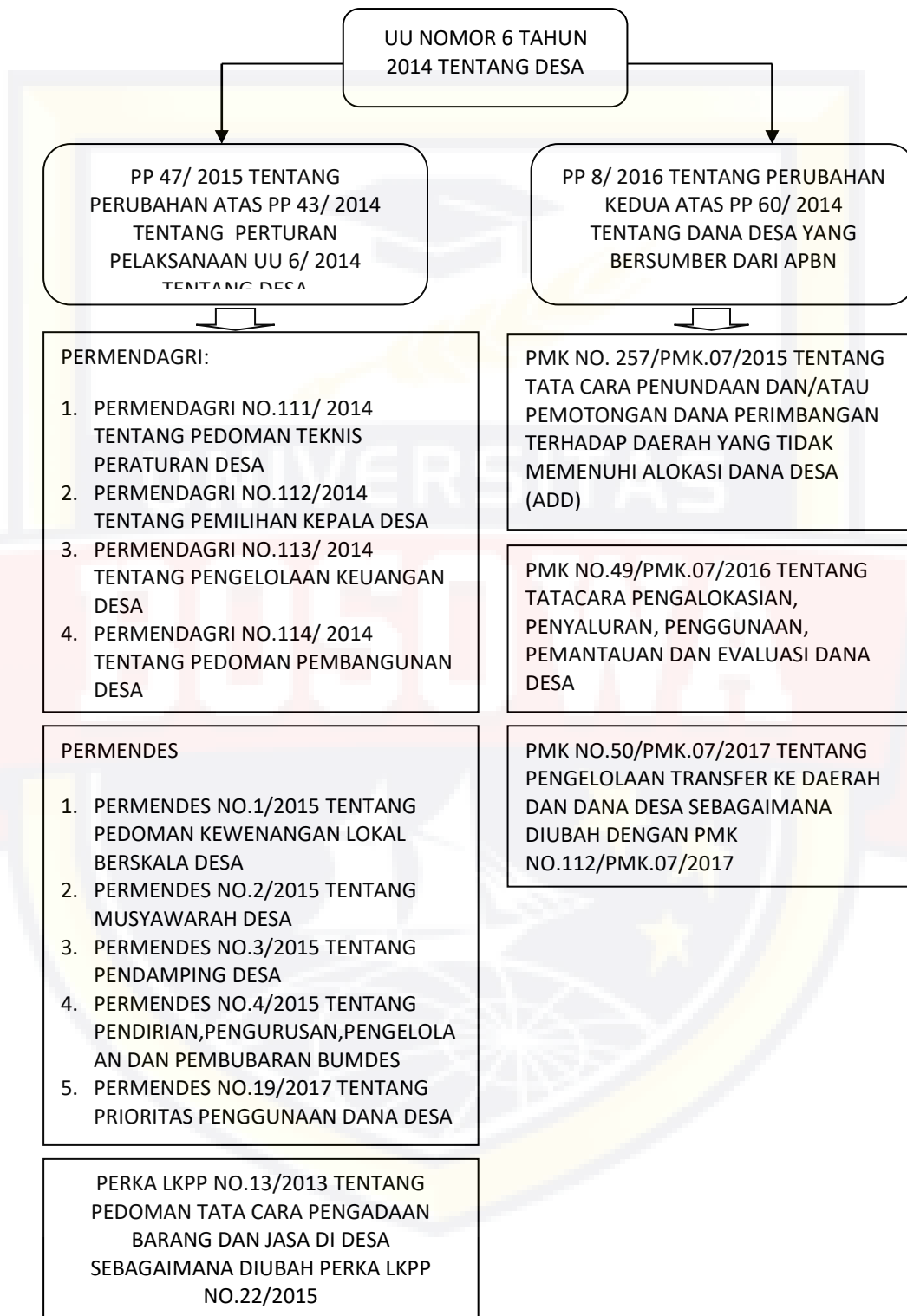
Sebagai wujud pengakuan negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan Desa, serta

memperkuat kedudukan Desa dan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai Desa yang di wujudkan dengan lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Asas Pengaturan Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul.
- 2) Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.
- 3) Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.
- 4) Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 5) Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa.
- 6) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa.
- 7) Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

- 8) Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
- 9) Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
- 10) Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
- 11) Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.
- 12) Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 13) Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

b) Dasar Peraturan Desa Dan Dana Desa



Gambar 2.3:Dasar Peraturan Desa Dan Dana Desa

3. Perencanaan penggunaan Dana Desa

Perencanaan penggunaan dana desa berdasarkan RPJMN untuk meningkatkan pembangunan desa menurut sri mulyani (2017:25) yaitu:

a. Pemberdayaan ekonomi lokal

Pemberdayaan yaitu upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

b. Penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan

Penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan yaitu upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung akselerasi masyarakat.

c. Percepatan pemenuhan kebutuhan dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar yaitu upaya dalam menyediakan kebutuhan prioritas masyarakat desa.

4. Tujuan Dana Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dana Desa memiliki tujuan yaitu:

- a) Meningkatkan pelayanan publik di Desa
- b) Mengentaskan kemiskinan
- c) Memajukan perekonomian Desa
- d) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa

e) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan

5. Penyaluran Dana Desa

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Dana Desa adalah penyaluran Dana Desa dari APBN ke pemerintah Desa. Walaupun Dana Desa merupakan hak pemerintah Desa, namun pelaksanaan penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan Dana Desa, proses penyaluran dana mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah Desa sebagai pengguna Dana Desa maupun oleh pemerintah kabupaten atau kota. Ketentuan terkait penyaluran Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dana Desa, sebagaimana diubah dengan peraturan menteri keuangan Nomor 112/PMK.07/2017. Dalam pasal 99 PMK Nomor 112/PMK.07/2017 dijelaskan, penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan tahap satu cepat bulan maret dan paling lambat bulan juli sebesar 60% (enam puluh persen). Untuk tahap kedua paling cepat bulan agustus sebesar 40% (empat puluh persen). Adapun penyaluran dari

RKUD ke RKD dilakukan paling lama tujuh hari setelah Dana Desa diterima di RKUD.

6. Penggunaan Dana Desa

Dalam Penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengetahui Implementasi dana desa dalam pembangunan desa yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 78 bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk mengawal dan memastikan pencapaian sasaran pembangunan Desa maka ditetapkan prinsip penggunaan Dana Desa yaitu:

- d. Keadilan yang mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.
- e. Kebutuhan prioritas untuk mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih di butuhkan dan berhybungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
- f. Kewenangan Desa yang mengutamakan kewenangan hak, asal usul dan kewenangan lokal yang berskala Desa.
- g. Partisipatif yang mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat Desa.

h. Swakelola yang berbasis sumber daya Desa yang mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran, keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.

i. Tipologi Desa yang mempertimbangkan keadaan karakteristik geografis, sosiologi, antropologi, ekonomi dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Adapun rincian Dana Desa per kabupaten/kota diantaranya; berdasarkan alokasi yang dihitung dengan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat memperhatikan jumlah kesulitan geografis Desa.

Dengan kata lain, penggunaan Dana Desa memerlukan pertimbangan dalam hal sisi/bagian mana dari kebutuhan Desa yang paling mendesak untuk segera di benahi, bukan hanya dalam hal mendesak namun bidang tersebut juga harus mampu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kebutuhan sebahagian besar masyarakat yang jadi warga Desa itu sendiri. Beranjak dari paparan tersebut maka pemerintah Desa dan warganya mampu menentukan prioritas dari pembangunan Desa yang akan dilaksanakan. Adapun tujuan dari pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa diantaranya :

- Acuan bagi Desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa
- Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa
- Acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan Desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahun.

Prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut

a) Bidang pembangunan Desa

Diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa.

b) Bidang pemberdayaan masyarakat Diarahkan untuk:

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa
- Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat Desa
- Pengembangan sistem informasi Desa
- Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar

- Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif
- Dukungan pengelolaan usaha ekonomi
- Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup
- Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama dengan pihak ketiga

7. Pemantauan dan pengawasan Dana Desa

Pemantauan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian Dana Desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan di Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan demikian, maka kesenjangan pembangunan antara perDesaan dengan perkotaan dapat berkurang. Pemantauan dan pengawasan juga di tujukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pemantauan melibatkan seluruh stakeholder pengelolaan Dana Desa baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Agar pengelolaan Dana Desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat Desa, camat, badan permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa.

8. Evaluasi Dana Desa

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan Dana Desa agar tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT.

Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal. Agar proses evaluasi dapat lebih efektif maka telah ditetapkan mekanisme pemberian sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan Dana Desa terdapat penyimpangan.

Indikator dari perencanaan penelitian ini berdasarkan RPJMN yang dikeluarkan oleh menteri keuangan yaitu Evaluasi Dana Desa

menurut menteri keuangan (Sri Mulyani 2017:17-22) dapat drefleksikan dengan:

1. Output dan outcome Dana Desa

Penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan memastikan bahwa ketercapaian output dan outcame dapat lebih maksimal.

2. Dampak Dana Desa terhadap kemandirian Desa

Dana desa menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian desa yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status desa.

3. Kinerja penyaluran dan penyerapan

Kinerja penyaluran dana desa dapat diperinci dalam Penyaluran dari RKUN ke RKUD dan penyaluran RKUD ke RKD.

4. Kendala dalam penyaluran dan penggunaan.

ii. Kinerja dalam penyaluran

1. Tata cara perhitungan belum sesuai ketentuan
2. Laporan realisasi belum disampaikan
3. Pengajuan penyaluran tahap II pada bulan terakhir

iii. Kendala dalam penggunaan

1. Penggunaan diluar bidang prioritas
2. Pengeluaran tidak didukung bukti
3. Pekerjaan oleh pihak ketiga

4. Pajak tidak sesuai ketentuan desa belum mengenal uang persediaan

5. Belanja diluar anggaran

c. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat secara konseptual adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Menurut (Priyono dan Pranarka 1996:112), dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logis sebagai berikut:

1. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi
2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran

3. Kekuasaan akan membangun bangunan atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi
4. Pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Priyono dan Pranarka, 1996:75). Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*).

Menurut Sumodiningrat (1999:38), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Moeljarto (1998:148) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia, penciptaan peluang usaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan system pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian

pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Sejalan dengan pendapat dari Moeljarto dalam Supriatna (1998 : 201) dinyatakan pula bahwa partisipasi menjadi sangat penting dalam pembangunan, karena :

- a) Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan
- b) Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi
- c) Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah, yang tanpa keberadaanya akan tidak terangkap arus informasi ini
- d) Pembangunan akan lebih baik
- e) Partisipasi memperluas zone (wawasan) penerima proyek pembangunan
- f) Akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat
- g) Partisipasi menopang pembangunan
- h) Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia
- i) Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat

d. Program Padat Karya Dan *Cash For Work*

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menggariskan bahwa pada dasarnya pengalokasian Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan tersebut antara lain melalui *earmarking* terhadap terhadap penggunaan dana desa dalam

Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam implementasinya kegiatan Dana Desa diarahkan dilaksanakan dengan cara swakelola.

Pemerintah secara khusus memberikan perhatian terhadap hal ini. Konsep swakelola dalam arahan pemerintah ditujukan agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat desa yang secara kondisi ekonomi masuk dalam kelompok masyarakat miskin. Dari arahan pemerintah kemudian muncul istilah program padat karya dan *cash fork work*.

1. Prinsip skema padat karya dan cash for work

- a) Bersifat swakelola, perencanaan dan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak lain.
- b) Menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat atau bersifat padat karya, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja
- c) Menggunakan bahan baku atau material setempat.

2. Tahapan perencanaan padat karya dan cash for work

- a) *Bottom up planning*, artinya kegiatan harus merupakan kebutuhan masyarakat, dan masyarakat yang mengelolanya.
- d) Mengutamakan prinsip musyawarah (mufakat)
- e) Memilih dan menetapkan beberapa program kegiatan yang sangat dibutuhkan dan paling prioritas

- f) Mengidentifikasi potensi sumber daya lokal yang tersedia
 - g) Menentukan lokasi berdasarkan prioritas pembangunan desa
 - h) Mengidentifikasi jenis kegiatan
 - i) Menganggarkan kegiatan yang bersifat padat karya dan dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDes yang disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD.
3. Tahap pelaksanaan padat karya dan *cash for work*
- a) Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara swakelola
 - b) Pekerjaan dilaksanakan seluruhnya dengan mengoptimalkan masyarakat desa setempat
 - c) Pada tahap persiapan dilakukan penunjukan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana pelaksana kegiatan dan penyediaan alat dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan fisik.

e. Badan usaha milik desa (Bumdes)

Menurut pusat kajian dinamika sistem pembangunan (2007) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Untuk menggerakkan perekonomian di Desa yang bercirikan semangat kolektif dan kegotongroyongan, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUMDes dapat dilakukan hanya untuk lingkup satu desa atau BUMDes bersama pada lingkup antar desa.

Pendirian BUMDes dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas Desa dalam menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Desa dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hasil usaha Bumdes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). BUMDes merupakan:

- Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa.
- Melalui penyertaan secara langsung
- Dari kekayaan desa yang dipisahkan
- Guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya.
- Untuk kesejahteraan masyarakat desa.

1. Tujuan BUMDes yaitu;

- a) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan perekonomian di desa untuk kesejahteraan masyarakat
- b) Kemandirian ekonomi di tingkat Desa

2. Prioritas bidang usaha BUMDes yaitu:

- a) Pengelolaan sumber daya alam

- b) Jaringan distribusi
- c) Industri pengelolaan berbasis sumber daya lokal
- d) Sektor keuangan atau permodalan
- e) Pelayanan publik

B. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang relevan merupakan penelaahan dari hasil penelitian sebelumnya yang diperlukan untuk mempertajam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nunik Chumaidah Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang, dengan judul Implementasi Kebijakan Dana Desa (DD) Dalam Menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Tahun 2015-2016). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif (*descriptive research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut yaitu:
 - a. Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa hampir seluruh badan pelaksana kegiatan Dana Desa mempunyai persepsi yang sama, yaitu kegiatan dilakukan sesuai dengan tujuan awal, karena kegiatan tersebut dapat menjadikan Desa Grogol menjadi lebih maju, sehingga tidak boleh ada tindakan yang menyalahi aturan yang dapat merugikan masyarakat.
 - b. Dari penomona-penomena tersebut dapat dikatakan bahwa sikap badan pelaksana merupakan faktor penting dalam proses implementasi Dana Desa di wilayah Grogol.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luthfi Musthafa, Universitas Islam Indonesi Yogyakarta. Judul penelitian yaitu Implementasi Pencairan Dan Pengelolaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2016. metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara pengelolaan data dan penyajian data yang digunakan untuk mendeskripsikan dari hasil data-data dari Desa. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu:

- a. Pencairan Dana Desa dan alokasi Dana Desa di kabupaten purworejo diatur menggunakan regulasi yang tidak statis dikarenakan daerah harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, disamping itu kebijakan yang dilakukan daerah juga harus menyesuaikan dengan kemampuan Desa dalam hal proses administrasi pencairan Dana Desa dan alokasi Dana Desa.
- b. Proses pencairan Dana Desa dan alokasi Dana Desa di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo masih mengalami keterlambatan dari ketentuan mengenai jadwal penyaluran Dana Desa maupun alokasi Dana Desa ang sudah ditetapkan dalam peraturan meteri keungan baik dalam semester I maupun semester II.
- c. Proses pencairan dan pengelolaan Dana Desa dan alokasi Dana Desa di Kecamatan Bener dipengaruhi oleh beberapa hal yang dapat menjadi faktor penghambat dan juga faktor pendukung proses tersebut, diantaranya adalah sumber daya manusia yang masih minim baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta regulasi yang berubah-ubah

sehingga aparat pemerintah Desa harus menyesuaikan dengan setiap perubahan peraturan dalam hal pemenuhan administrasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Munirah, Universitas Maritim Raja Haji Ali Kepulauan Riau. Judul penelitian yaitu Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lubuk Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi yang berkembang dan proses yang sedang berlangsung. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu:

- a. pengelolaan Dana Desa di Desa Lubuk Kecamatan Kundur Kabupaten karimun tahun 2017 bisa dikatakan cukup baik, karena dalam pelaksanaannya sudah melibatkan masyarakat.
- b. Dampak yang ditimbulkan dari adanya Dana Desa dari segi pembangunan fisik sudah bisa dirasakan masyarakat Desa Lubuk.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 :Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Perbedaan
Nunik Chumaidah	Implementasi Kebijakan Dana Desa (DD) Dalam Menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat PeDesaan (Studi Kasus Di Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Tahun	Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang	a) Lokasi penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh Nunik Chumidah di lakukan pada Desa yang ada di pulau jawa yang merupakan Desa lebih berkembang dengan Desa yang akan dilakukan oleh peneliti. b) penelitian terdahulu menggunakan <i>snowball</i>

	2015-2016)		<i>sampling</i> yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi dan mengambil sampel atau memilih kasus-kasus dalam suatu jaringan, teknik ini di mulai dari satu atau sedikit orang atau kasus dan menyebar pada basis-basis hubungan pada kasus-kasus pertama.
Muhammad Luthfi Musthafa,	Implementasi Pencairan Dan Pengelolaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	c) sasaran penelitian. penelitian yang dilakukan Muhammad Luthfi Musthafa dilakukan secara luas dengan mengambil lokasi pada wilayah kecamatan yang merupakan penelitian dilakukan meliputi semua Desa yang ada pada kecamatan tersebut sedangkan penelitian yang dilakukan penulis hanya mengambil wilayah Desa.
Munirah	Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lubuk Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun	Desa Lubuk Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun	d) detail penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Munirah dilakukan secara rinci dengan melakukan penelitian evaluasi pengelolaan Dana Desa yang artinya hanya fokus pada evaluasi sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu secara meluas, mulai dari perencanaan Dana Desa, implementasi Dana Desa dan evaluasi Dana Desa

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Kebijakan publik tidak lepas dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

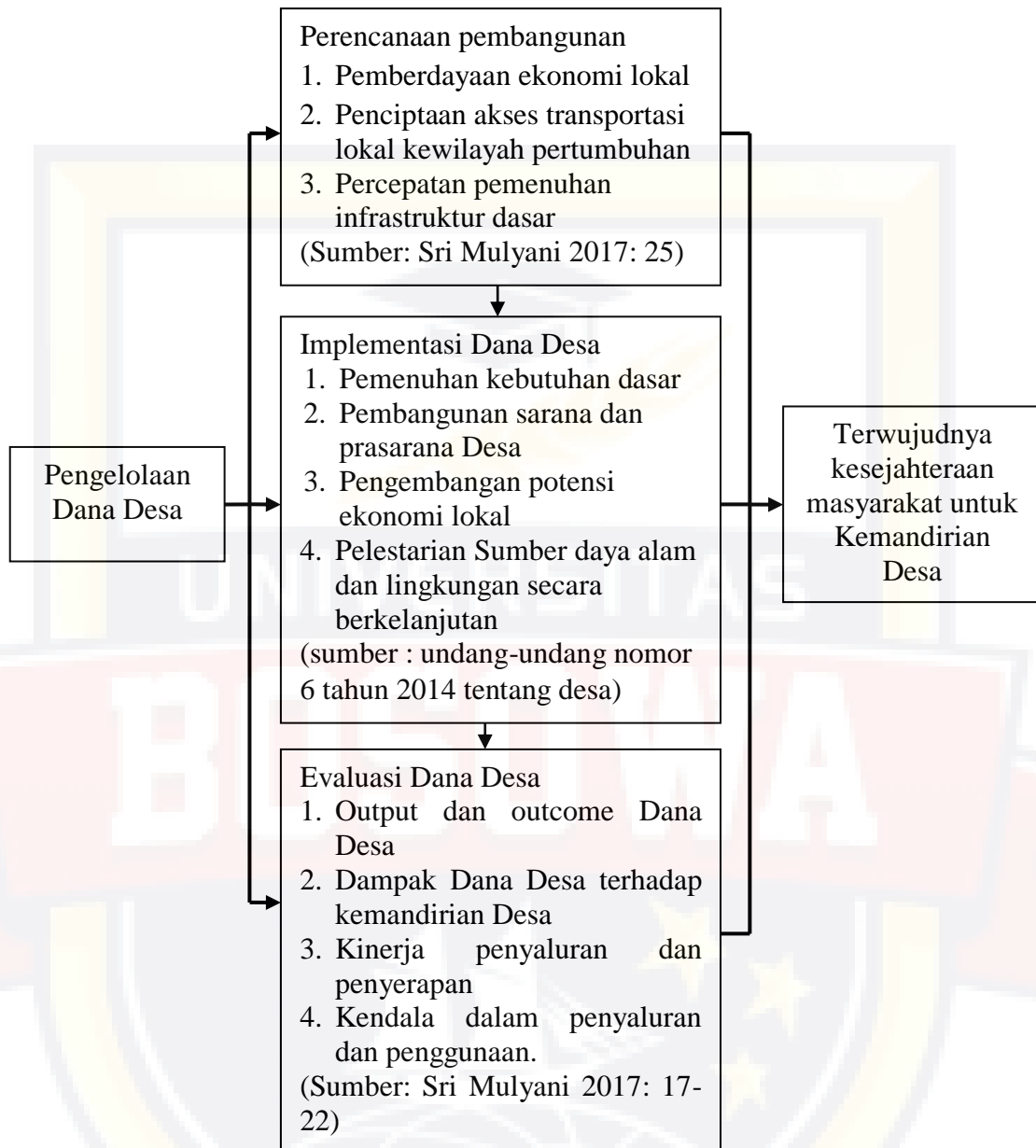
Dana Desa merupakan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun negeri dari pinggiran. Dana Desa disalurkan ke Desa dengan jumlah yang sangat besar untuk menunjang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dana Desa diatur dalam UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Untuk mengetahui implementasi Dana Desa di Desa Bolli maka dirumuskan tiga pertanyaan yaitu apa perencanaan pembangunan melalui anggaran Dana Desa? Bagaimana implementasi Dana Desa? Dan bagaimana evaluasi Dana Desa?.

Dalam kerangka konsep penelitian ini akan dijelaskan pengelolaan Dana Desa melalui perencanaan pembangunan yang sesuai dengan RPJMN yang dikeluarkan oleh menteri keuangan maka dibutuhkan indikator yaitu (1) pemberdayaan ekonomi lokal, (2) penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan, (3) percepatan pemenuhan infrastruktur dasar. Kemudian bagaimana Implementasi Dana Desa di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone didasarkan dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dengan beberapa indikator yaitu (1) pemenuhan infrastruktur dasar, (2) pembangunan sarana dan prasarana desa, (3) pengembangan potensi ekonomi lokal, (4) pelestarian sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan Dan bagaimana evaluasi Dana Desa di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone yang terkait dengan (1) output dan outcome Dana Desa, (2) dampak Dana Desa terhadap kemandirian desa, (3) kinerja penyaluran dan penyerapan, (4) kendala dalam

penyaluran dan penggunaan. Tujuan dari pengelolaan Dana Desa tersebut yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat untuk kemandirian desa.

Untuk lebih jelasnya kerangka konseptual implementasi Dana Desa dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:





Gambar 2.4 :Kerangka Konsep Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian kualitatif, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis, metode penelitian ini digunakan untuk meneliti kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kondisi pada saat ini. Metode penelitian ini dipilih untuk memberikan data secara sistematis, faktual dan akurat terkait fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali dan memperoleh data mengenai implementasi Dana Desa dalam pelaksanaan di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.

B. INFORMAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan cermat sehingga relevan dengan Desain penelitian, dalam hal ini dengan menentukan beberapa informan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan dianggap mengetahui serta mampu memberikan keterangan tentang masalah yang diteliti. Untuk mendapatkan data empiris maka ditetapkan beberapa pihak yang menjadi informan yaitu:

1. Kepala Desa, jumlah 1 orang
2. Sekretaris Desa dan bendahara Desa, jumlah 2 orang

3. Kepala Dusun, berjumlah 7 orang
4. ketua BPD, jumlah 1 orang

Jumlah informan pada penelitian ini adalah 11 Orang. Penentuan informan tersebut didasari pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup memadai dengan keterlibatan mereka secara langsung dalam implementasi Dana Desa di Desa Bolli. Dengan pemilihan informan dengan jumlah 11 orang tersebut di harapkan dapat memberikan data yang akurat terkait implementasi Dana Desa dalam pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone

C. SUMBER DATA

1. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran studi pustaka, pedoman peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan hasil penelitian terdahulu maupun tulisan-tulisan lainnya yang relevan mendukung data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penelitian ini fokus pada perencanaan Dana Desa, implementasi Dana Desa, dan evaluasi Dana Desa di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. Untuk mendukung data yang diteliti maka dibutuhkan teori, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi.
2. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur, wawancara terbuka dan teknik observasi lapangan. Tujuan wawancara terstruktur, wawancara terbuka dan observasi dilakukan yaitu untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan perencanaan Dana Desa seperti (1) pemberdayaan ekonomi lokal, (2) penciptaan akses transportasi lokal kewilayah

pertumbuhan, (3) percepatan pemenuhan infrastruktur dasar. Kemudian data yang berkaitan dengan implementasi Dana Desa seperti (1) pemenuhan kebutuhan dasar, (2) pembangunan sarana dan prasarana, (3) pengembangan potensi ekonomi lokal, (4) pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan secara berkelanjutan, (5) peningkatan kapasitas warga, (6) mendukung kegiatan bumdes. Dan evaluasi Dana Desa berkaitan dengan (1) output dan outcome dana desa, (2) dampak dana desa terhadap kemandirian desa, (3) kinerja penyaluran dan penyerapan, (4) kendala dalam penyaluran dan penggunaan.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas penelitian deskriptif analitis dan kualitas pengumpulan data. Kualitas penelitian deskriptif dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Kualitas pengumpulan data sesuai dengan ketepatan cara-cara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan suatu teknik untuk memperoleh data dan untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah yang dan pertanyaan yang diajukan kepada informan yang diwawancarai. Wawancara

dilakukan dengan mendatangi informan penelitian dan menanyakan kepada informan beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Dalam wawancara akan dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data akurat secara lansung melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak yang terkait dengan implementasi Dana Desa dalam pembangunan di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. Data yang dibutuhkan dalam proses wawancara adalah data yang terkait dengan perencanaan pembangunan di Desa Bolli yaitu (1) Pemberdayaan ekonomi lokal, (2) Penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan, (3) Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar. Data yang menyajikan implementasi Dana Desa di Desa Bolli yaitu (1) Pemenuhan kebutuhan dasar, (2) Pembangunan sarana dan prasarana desa, (3) Pengembangan potensi ekonomi lokal, (4) Pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan secara berkelanjutan, (5) Peningkatan kapasitas warga, (6) Mendukung kegiatan Bumdes. dan data hasil evaluasi Dana Desa di Desa Bolli yaitu (1) Output dan outcome Dana Desa (2) Dampak Dana Desa terhadap kemandirian desa, (3) Kinerja penyaluran dan penyerapan, (4) Kendala dalam penyaluran dan penggunaan. Data yang dihasilkan melalui wawancara akan dianalisis dan diolah lebih detail untuk mendapat data yang akurat.

2. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pemantauan terhadap suatu objek atau wilayah yang akan diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian, secara langsung dengan

terlibat ke lapangan dengan melibatkan seluruh pancaindra. Sedangkan tidak langsung dengan dibantu mediavisual atau audiovisual. Observasi dilakukan untuk melihat atau mengamati secara langsung atau tidak langsung terhadap implementasi Dana Desa dalam pembangunan di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. Data yang akan diperoleh dari observasi yaitu data untuk mendukung pendapat informan dengan membuktikan langsung melalui pengamatan di lapangan.

3. Library study (Studi kepustakaan)

Studi kepustakaan yaitu untuk mendapatkan bahan berupa pengetahuan teoritis dengan membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas untuk di jadikan dasar dan pedoman dalam penelitian ini. Untuk mendukung data yang ada dilapangan maka dilakukan studi kepustakaan agar data yang dilapangan sesuai dengan teori atau aturan yang ada.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan atau penyimpanan informasi data dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

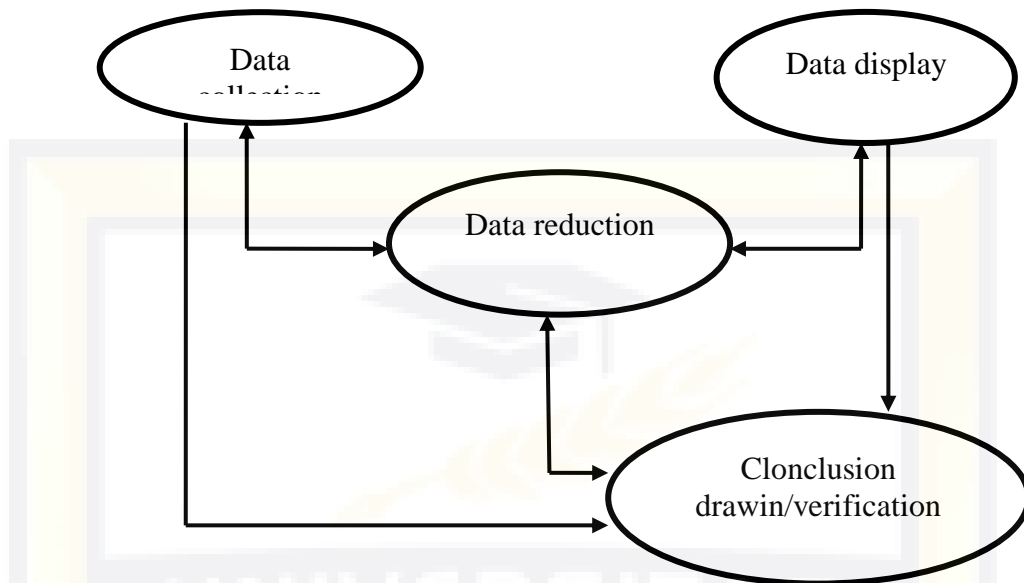
E. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan deskriptif analisis yaitu mengunpulkan dan merekap data yang bukan dicatat dalam bentuk angka namun penjelasan yang yang lebih rinci secara mendalam.

Informasi yang dikumpulkan diidentifikasi menjadi konsep, selanjutnya diolah menjadi proposis-proposisi. Kemudian dikembangkan dari perbandingan data empiris dengan hasil-hasil penelitian atau teori lain yang relevan.

Selama di lapangan dilakukan wawancara dan observasi, dalam wawancara berpedoman pada pertanyaan yang ada dan berdiskusi dengan informan. Observasi dikembangkan hal yang perlu diobservasi walaupun sudah ada sudah ada pedoman observasi, namun tidak tertutup kemungkinan ada hal baru yang belum termasuk dalam pedoman akan tetapi diperlukan untuk dijadikan data penelitian. Wawancara berpedoman pada butir-butir pertanyaan yang ada dikembangkan saat berdiskusi dengan informan.

Berdasarkan penjabaran diatas penelitian ini menggunakan Model Miles and Huberman sebagai teknik analisis data kualitatif, dimana analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data sedang berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014: 91) mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas sampai datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing verification. Model interaktif ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar 3.1 :Komponen Analisis Data Miles and Huberman

1. *Data collection* (pengumpulan data)

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai macam teknik seperti melalui wawancara, observasi di lapangan dan dokumentasi dari subyek dan obyek penelitian yang terkait dengan perencanaan implementasi Dana Desa dalam pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bolli Kecamatan PonreKabupaten Bone.

2. *Data Reduction* (reduksi data atau pengolahan data)

Data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak sehingga perlu dicatat dengan teliti dan rinci dimana semakin lama peneliti di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, rumit dan kompleks. Untuk itu perlu dilakukan analisis data dengan melalui reduksi data. Melakukan reduksi data berarti merangkum data yang diperoleh, memilih hal-hal yang pokok dan di cari tema dan polanya sehingga data yang telah

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk peneliti melakukan pengumpulan data jika selanjutnya diperlukan.

3. *Data Display* (penyajian data)

Mendisplay data yang bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori *flowchart* dan sebagainya. Mile and Huberman dalam Sugiyono (2014: 94) mengemukakan bahwa dalam penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks narasi. Dengan mendisplay data maka akan dengan mudah untuk memahami apa yang terjadi untuk merencanakan kerja selanjutnya dengan apa yang dipahami.

4. *Conclusion Drawing/ Verification* (pemaparan dan penarikan kesimpulan)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014: 94) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan awal yang didukung dengan adanya bukti yang benar dan konsistensi data peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Temuan dapat berbentuk deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih ragu-ragu sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan yang kausal, hipotesis atau teori Sugiyono (2014: 99). Dalam konteks ini kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah data disajikan agar dapat diketahui hasil akhir dari penelitian.

F. LOKASI DAN JADWAL PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.

Penelitian dilaksanakan untuk mengetahui implementasi Dana Desa dalam pembangunan di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. Dalam penelitian ini akan dibahas perencanaan pembangunan di Desa Bolli melalui Dana Desa, implementasi Dana Desa di Desa Bolli dan evaluasi Dana Desa di Desa Bolli. Kenapa penelitian ini dilaksanakan di Desa Bolli karena implementasi Dana Desa di Desa Bolli dinilai belum maksimal dan belum mengedepankan prinsip Dana Desa yaitu pembangunan secara prioritas.

Penelitian dilaksanakan dengan durasi satu bulan dimulai pada tanggal 12 November 2019 sampai tanggal 12 Desember 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Lokasi Penelitian

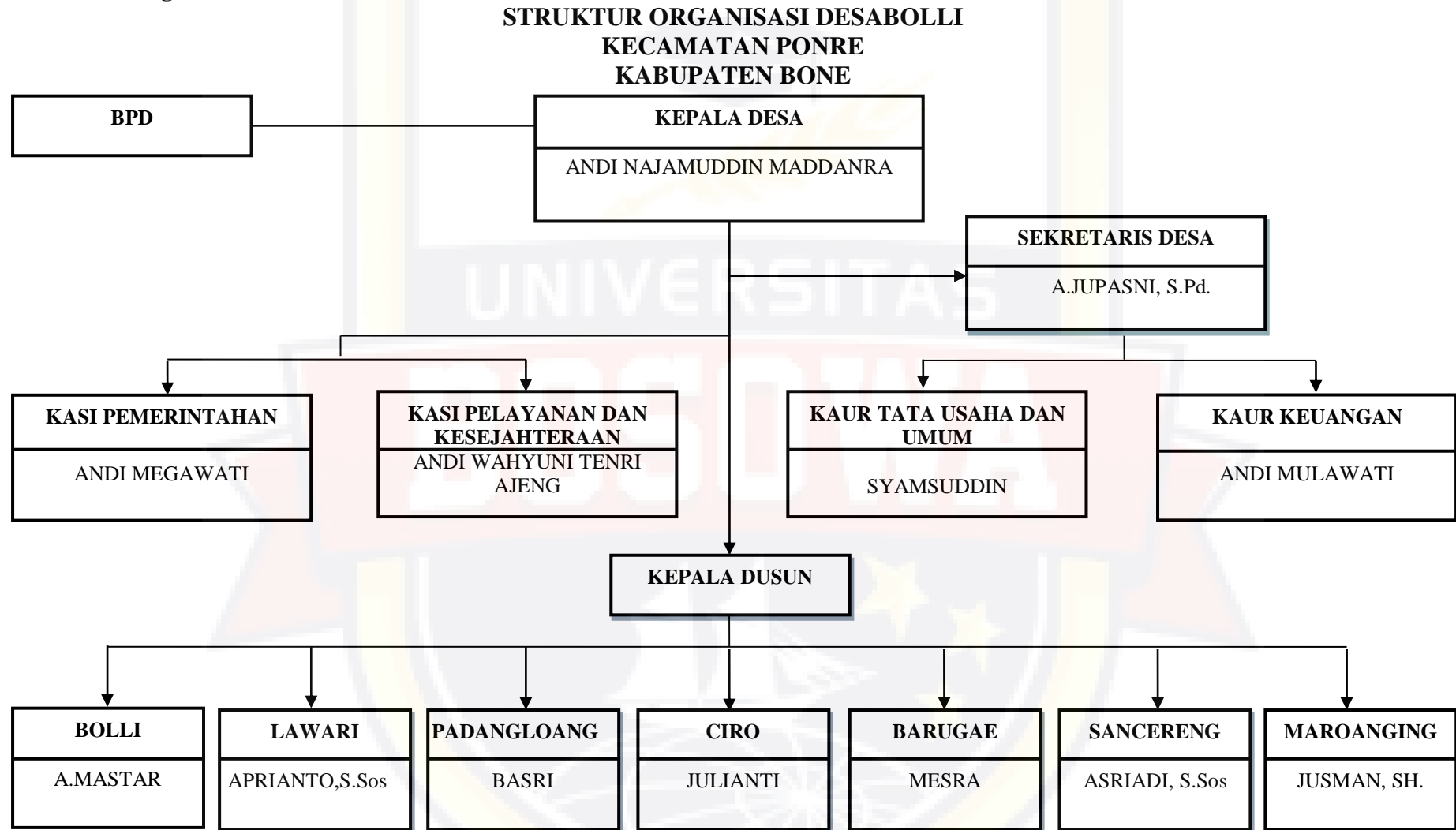
a. Visi Misi Desa Bolli

Visi “Mewujudkan DesaBolli Lebih Maju, Demokratis, Bersatu, Makmur dan Mandiri

Untuk mewujudkan Visi tersebut, DesaBolli menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Masyarakat.
2. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor, untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan masyarakat.
3. Menjamin kondisi aman, damai, tertib dan keamanan yang kondusif bagi masyarakat.
4. Mengembangkan dan meningkatkan pembinaan kemasyarakatan sehingga tercipta pelayanan yang prima, untuk menunjang pendapatan perekonomian masyarakat yang memadai.
5. Terwujudnya masyarakat yang mandiri menjunjung etika dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri dalam ruang lingkup Desa.

b. Struktur Organisasi Desa Bolli



Sumber: administrasi pemerintah Desa Bolli 2019

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Desa Bolli

Tufoksi kepala Desa berdasarkan permendagri No.6 Tahun 2016.

1. Tugas pokok dan fungsi kepala Desa

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perDesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa

- a. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- b. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

- 5) Melaksanakan buku administrasi Desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.
3. Tugas Pokok dan Fungsi kepala urusan tata usaha dan Umum
- a. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
 - b. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
 - d. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan tata usaha dan umum mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas
 - 2) Melaksanakan administrasi surat menyurat
 - 3) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan Desa
 - 4) Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa
 - 5) Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor
 - 6) Penyiapan rapat-rapat
 - 7) Pengadministrasian aset Desa
 - 8) Pengadministrasian inventarisasi Desa
 - 9) Pengadministrasian perjalanan dinas
 - 10) Melaksanakan pelayanan umum.
4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan
- a. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

b. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

d. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:

1) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa

2) Menyusun RAPBDes

3) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa

4) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa

5) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah Desa (RKPDesa)

6) Menyusun laporan kegiatan Desa

7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

a. Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.

b. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.

c. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

1) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa

2) Menyusun rancangan regulasi Desa

- 3) Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan
- 4) Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Desa

- 5) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa
- 6) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan
- 7) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa
- 8) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa
- 9) Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi pelayanan dan Kesejahteraan

- a. Kepala seksi pelayanan dan kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
- b. Kepala seksi pelayanan dan kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan
- c. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi :
 - 1) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya
 - 2) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi
 - 3) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik
 - 4) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup

5) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga

6) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna

7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun

a. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:

1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

8. Tugas pokok dan fungsi badan permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan permendagri No. 110 Tahun 2016.

a. Tugas pokok BPD

- 1) Menggali aspirasi masyarakat
- 2) Menampung aspirasi masyarakat
- 3) Mengelola aspirasi masyarakat
- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat
- 5) Menyelenggarakan musyawarah BPD
- 6) Menyelenggarakan musyawarah Desa
- 7) Membentuk panitia pemilihan kepala Desa
- 8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan kepala Desa antarwaktu
- 9) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa
- 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa
- 11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa
- 12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi BPD

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

3) Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

c. Kondisi Geografis DesaBolli

Secara geografis DesaBolli, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi :

1. Luas wilayah :

Luas wilayah Desa adalah : 2.734,5 Ha, terdiri dari berbagai jenis tanah yang meliputi.

- | | |
|-----------------------------------------------|-------------|
| a. Tanah pekarangan pemukiman dan perkantoran | : 558 Ha. |
| b. Tanah Kebun | : 453 Ha. |
| c. Tanah Sawah | : 318 Ha. |
| d. Tanah Ladang | : 125 Ha. |
| e. Tanah Hutan Rakyat | : 280,5 Ha. |
| f. Tanah | : 1.000 Ha. |

2. Iklim :

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| a. Curah hujan | : 2000-3000 Mm |
| b. Jumlah bulan hujan | : 6 Bulan |
| c. Suhu rata-rata harian | : 20-30 C° |
| d. Bentang Wilayah | : Datar, Berbukit dan
Pegunungan |

3. Orbitasi :

- | | |
|----------------------------------------|--------------------------|
| a. Jarak Ibu Kota Kecamatan | : 7 Km |
| b. Lama tempuh ke Ibukota Kecamatan | : 10 Menit |
| c. Kendaraan umum ke Ibukota Kecamatan | : Kendaraan Roda 2 dan 4 |

- d. Jarak ke Ibukota Kabupaten : 40 Km
- e. Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 45 menit
- f. Kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten : Kendaraan Roda 2 dan 4

4. Batas Desa :

- a. Sebelah Utara : Desa Pattimpa Kec. Ponre
- b. Sebelah Timur : Desa Ajangpulu Kec. Cina
- c. Sebelah Selatan : Desa Salampe Kec. Ponre
- d. Sebelah Barat : Desa Salebba Kec. Ponre

d. Gambaran Umum Demografis

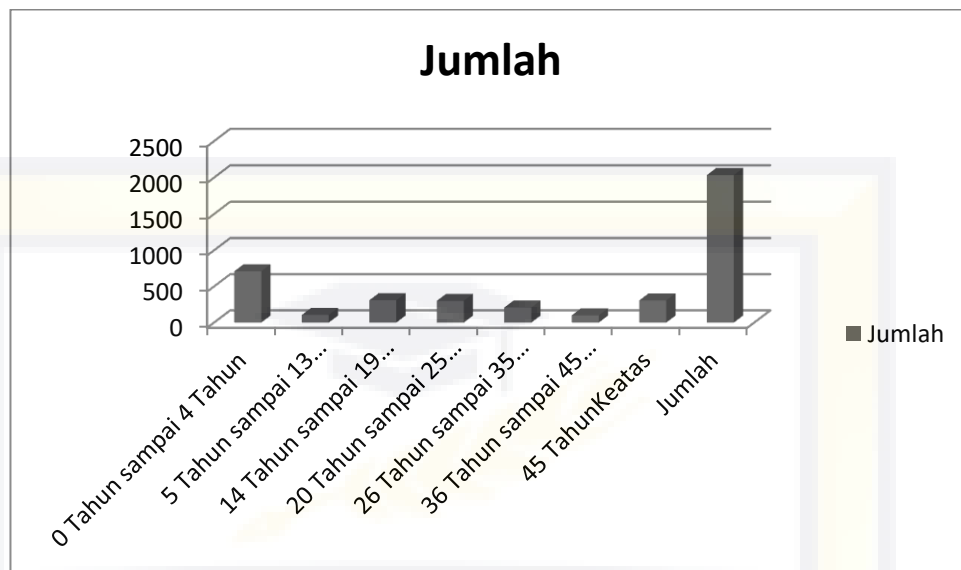
a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Bolli akhir Tahun 2016 sebanyak 2.034 jiwa, dan tingkat pertumbuhan penduduk Tahun 2016 dapat dilihat dalam bentuk Struktur jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin dan Mutasi pada Wilayah sebagai berikut :

Tabel 4.1 : Struktur Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	0 Tahun sampai 4 Tahun	710
2	5 Tahun sampai 13 Tahun	105
3	14 Tahun sampai 19 Tahun	309
4	20 Tahun sampai 25 Tahun	300
5	26 Tahun sampai 35 Tahun	208
6	36 Tahun sampai 45 Tahun	100
7	45 Tahun Keatas	307
Total		2.034

Sumber: LPPD Desa Bolli 2016

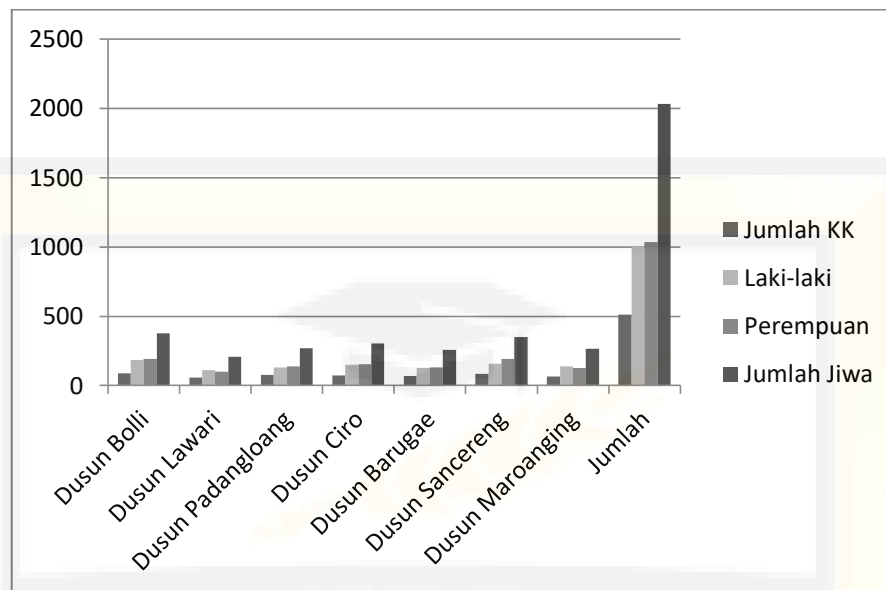


Gambar 4.2 : grafik jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

Tabel 4.2 : Struktur Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Dusun	Jumlah KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1	DusunBolli	89	184	194	378
2	DusunLawari	57	110	99	209
3	DusunPadangloang	76	129	140	269
4	DusunCiro	74	151	152	303
5	DusunBarugae	68	126	132	258
6	Dusun Sancereng	83	159	193	351
7	DusunMaroanging	64	140	126	266
Jumlah		511	999	1.036	2.034

Sumber: LPPD Desa Bolli 2016

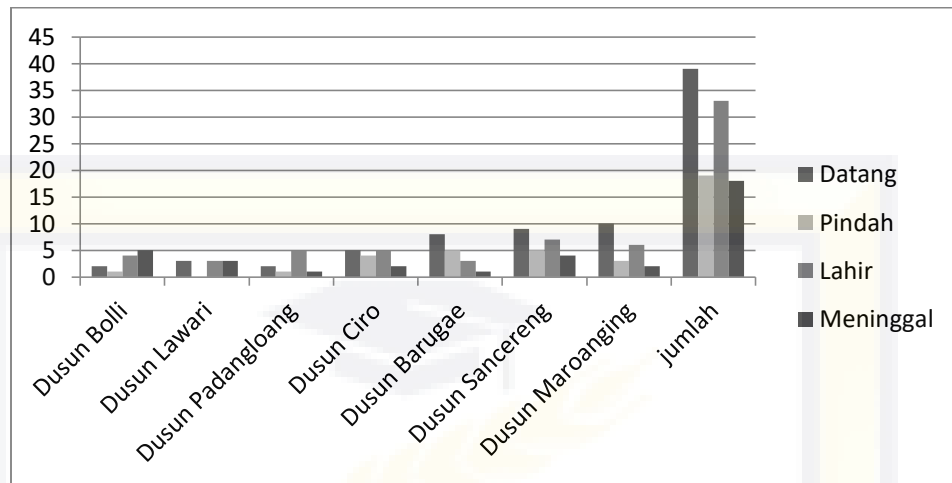


Gambar 4.3: jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.3: Mutasi penduduk pada wilayah Setiap Dusun

No	Dusun	Datang	Pindah	Lahir	Meninggal
1	DusunBolli	2	1	4	5
2	DusunLawari	3	0	3	3
3	DusunPadangloang	2	1	5	1
4	DusunCiro	5	4	5	2
5	DusunBarugae	8	5	3	1
6	Dusun Sancereng	9	5	7	4
7	DusunMaroanging	10	3	6	2
Jumlah		39	19	33	18

Sumber: LPPD Desa Bolli 2016



Gambar 4.4: Mutasi Jumlah Penduduk Pada Wilayah Setiap Dusun

b. Agama Penduduk

Penduduk DesaBolli semuanya memeluk agama islam.

e. Kondisi EkonomiDesaBolli

a. Potensi Unggulan Desa

1. Pertanian

DesaBolli merupakan Desa Agraris yang secara umum masyarakat DesaBolli bermata pencaharian sebagai petani, dari sektor pertanian yang menjadi komoditi unggulan adalah tanaman padi dengan luas persawahan seluas 250 Ha, dengan hasil rata-rata sebanyak 250 Ton per/Tahun.

2. Peternakan

Selain dari sektor pertanian masyarakat DesaBolli juga mengembangkan sektor peternakan dengan komoditi unggulan adalah hewan ternak sapi, dalam pengembangan sektor peternakan ini masyarakat mengembangkan dengan metode penggemukan, kemudian di Tahun 2019 dapat kami laporkan jumlah hewan ternak sebanyak 1.400 ekor.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Nilai nominal PDRB dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas harga berlaku dan PDRB harga konstan. PDRB harga berlaku merupakan output barang dan jasa dengan tingkat harga yang berlaku, sedangkan untuk PDRB harga konstan sama dengan PDRB harga berlaku akan tetapi dengan menghilangkan pengaruh harga.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas bahwa DesaBolli merupakan Desa agraris, dan produk unggulan disektor pertanian dan Peternakan, di DesaBolli Untuk subsektor ini menghasilkan 57,5 miliar pada tahun 2019. Dengan perhitungan PDRB atas harga berlaku di DesaBolliKecamatan Ponre selama 1 tahun ini meningkat 10 % (persen) dari tahun 2014 yang sebesar 5.7 Miliar Rupiah serta PDRB atas harga konstan Rp. 3.000/Kg untuk harga gabah dan harga rata-rata untuk harga sapi 7 juta/ekor pada tahun 2019 mengalami peningkatan 575 juta rupiah atau menjadi 57,5 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini menandakan terjadinya kenaikan produksi barang dan jasa di DesaBolliKecamatan Ponre.

f. Strategi dan Arah Kebijakan DesaBolli

Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana Strategis Desa, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan Dokumen dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes)dengan penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalamwujud Kegiatan baik Fisik maupunnon fisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) tahunan yangditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

1. Strategi

a. Aparatur Pemerintah Desa

- 1) Peningkatan kualitas penyelenggara Pemerintahan Desa di bidang Administrasi ditempuh melalui Peningkatan SDM Perangkat Desa.
- 2) Peningkatan pemahaman tugas dan fungsi perangkat Desa, dengan jalan Pelatihan bagi Perangkat Desa.
- 3) Peningkatan Pelayanan Masyarakat ditempuh melalui Peningkatan Disiplin jam kerja.

b. Pertanian

- 1).Peningkatan kemampuan petani agar komoditas pertanian dan perkebunan meningkat melalui penyuluhan ;
- 2).Peningkatan koordinasi antara Petani dengan Ketua Kelompok Tani atau dengan penyuluh pertanian;
- 3).Peningkatan produktivitas hasil petani melalui pengadaan Bibit padi unggul.

c. Peternakan

- 1) Peningkatan kemampuan peternak agar hasil peternakan meningkat melalui penyuluhan
- 2) Peningkatan pencegahan penyakit hewan ternak melalui paksinasi
- 3) Peningkatan produktivitas hasil peternakan melalui program kawin suntik.

d. Kesehatan

- 1) Peningkatan kualitas sehat bagi masyarakat usia dini melalui posyandu.

2) Peningkatan pelayanan kesehatan melalui disiplin jam kerja petugas kesehatan.

3) Peningkatan Gizi balita dengan melalui penambahan Pemberian Manakan Tambahan.

2. Arah Kebijakan

Strategi adalah arah kebijakan yang akan ditempuh dengan upaya mencapai tujuan :

- a. Meningkatkan sarana dan prasana infrastruktur;
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
- c. Mengembangkan jangkauan pelayanan kesehatan.

3. Prioritas Desa

Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya telah ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 6 Tahunan dan RKPD ini merupakan rel kegiatan selama 1 tahun untuk tahun 2019, dan yang menjadi prioritas berupa kegiatan Pembangunan infrastruktur Desa yang tertuang dalam APBDesa Tahun Anggaran 2016.

g. Program dan kegiatan DesaBolli

a. Pelaksanaan kegiatan pembangunan di DesaBolli, terbagi menjadi Dua bagian berupa fisik dan non fisik.

1) Kegiatan Fisik

a) Pembangunan Talud dan Hampar SirtuDusunCiro

- b) Pembangunan Taluddan Hampar Sirtu DusunBarugae
- c) Rehabilitasi Jembatan Beton DusunBarugae
- d) Pembangunan Jalan Tani DusunLawari
- e) Perkerasan Jalan dan Dekker DusunBolli
- f) Pembangunan Sumur Gali DusunLawari
- g) Pengadaan Sumur Bor DusunBarugae
- h) Pengadaan Pompa Air Dusun Lawri/Barugae
- i) Pembangunan Selokan Kantor Desa

2) Kegiatan Non Fisik

Pelatihan Kepala Desa dan aparatur Desa

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan yang dilaksanakan di DesaBolli, dilaksanakan dengan asas gotong royong atas kerja sama pemerintah Desa Lembaga Desa partisipasi masyarakat sehingga hasil lebih maksimal.

c. Permasalahan dan penyelesaian

Permasalahan yang terjadi ketika melaksanakan kegiatan tersebut diatas adalah ketika menggerakkan swadaya masyarakat, kadang suatu program kebenturan dengan rutinitas yang dikerjakan masyarakat, maka penyelesaian yang dilakukan yaitu memilih waktu yang tepat dan penyuluhan dan arahan kepada asyarakat tentang pentingnya gotong royong.

h. Program Pemerintah Kabupaten yang Diserahkan ke Pemerintahan DesaBolli

Urusan bidang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten telah diserahkan kepada Desa Tahun 2019 meliputi :

a. Program Dan Kegiatan

1) Bidang pertanian dan ketahanan pangan;

Program : Pembentukan Kelompok Tani

Kegiatan : Peningkatan Hasil Produksi Pertanian

2) Bidang Pemberdayaan MasyarakatDesa;

Program : Pembentukan Kelompok Perempuan/ PKK.

Kegiatan : Membantu Peningkatan Ekonomi Keluarga

b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Pengadaan Bibit Unggul dan Pupuk bersubsidi.
- 2) Penyuluhan secara terus menerus.
- 3) Pencegahan hama dan penyakit.
- 4) Pengadaan Pelatihan Industri Rumah Tangga (kursus menjahit)
- 5) Pemberian bantuan dana melalui Program Simpan Pinjam

c. Permasalahan dan Penyelesaian

1) Permasalahan

Minimnya anggaran yang masuk di DesaBolli

2) Penyelesaian

Meningkatkan peran serta anggota kelompok untuk berswadaya.

B. HASIL PENELITIAN

1. Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dikeluarkan oleh menteri keuangan bahwa dalam Dana Desa terdapat beberapa indikator yang harus direncanakan untuk meningkatkan

pembangunan desa yaitu melalui pembangunan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar. Desa Bolli telah menghasilkan perencana pembangunan sesuai RPJMN melalui murenbang.

a. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Perdayaan ekonomi lokal adalah upaya pemerintah desa dalam mengelolah potensi yang ada di desa. Untuk mengetahui perencanaan pemberdayaan ekonomi lokal peneliti melakukan wawancara kepada AJ, mengatakan:

“Dalam hasil musrenbang desa kepala Dusun telah mengusulkan beberapa program dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal yaitu melalui pengelolaan produksi dan meningkatkan hasil produksi, untuk itu ada beberapa program yang di usulkan. Program yang kami masukkan dalam RPJMDes dalam pemberdayaan ekonomi lokal yaitu pembuatan keripik pisang, pelatihan pembuatan bakso, pelatihan menjahit dan bantuan modal kepada usaha kecil seperti fotografer dan somel”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program tersebut direncanakan dilakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pada wilayah yang terdapat potensi desa dan bisa mengembangkan produk unggulan desa yang ditargetkan atau sesuai apa yang direncanakan pemerintah Desa Bolli bahwa dalam desa wilayah Desa Bolli akan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui anggaran Dana Desa.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa hasil wawancara kepada sekretaris desa benar adanya, bahwa pembuatan keripik pisang, pelatihan pembuatan bakso, pelatihan menjahit dan bantuan modal

kepada usaha kecil seperti fotografer dan somel. Pemberdayaan ekonomi lokal tersebut, pemerintah desa Bolli menggunakan anggaran dana desa dalam merealisasikan program tersebut.

b. Penciptaan Akses Transportasi Lokal Kewilayah Pertumbuhan

Perencanaan penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan di Desa Bolli merupakan hal prioritas karena dalam wilayah Desa Bolli merupakan wilayah yang masih sedikit tersentuh aspal. Penciptaan akses transportasi kewilayah pertumbuhan merupakan salah satu program yang paling diprioritaskan, untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian.

Untuk mengetahui perencanaan penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui program yang direncanakan dalam penciptaan akses transportasi kewilayah pertumbuhan, wawancara dilakukan kepada AJ selaku sekretaris desa mengatakan:

“Perencanaan pembangunan dalam penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan yaitu jalan desa dan jembatan desa karena itu memang merupakan kebutuhan masyarakat di Desa Bolli terutama Dusun Ciro, Dusun Barugae, Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging. Pembangunan jalan desa dan jembatan dilakukan secara mandiri dengan mengandalkan anggaran Dana Desa yang setiap tahunnya ada, karena pembangunan jalan desa dan jembatan desa merupakan fokus utama dari pemerintah Desa Bolli, itu disebabkan karena akses transportasi kewilayah pertumbuhan menjadi kendala utama masyarakat desa dalam melakukan aktivitas kewilayah pertumbuhan. Dalam pelaksanaannya kami melibatkan masyarakat dengan melakukan pengupahan”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud dari pemerintah Desa Bolli merencanakan program tersebut supaya masyarakat desa bisa melakukan akselerasi dari wilayah pemukiman kewilayah pertumbuhan untuk melakukan aktivitas perekonomian dengan mudah karena selama ini masyarakat yang berada di Dusun Ciro, Dusun Barugae, Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging sangat kewalahan jika musim hujan jalanan yang ada di empat dusun tersebut licin dan susah dilalui karena digenangi air.

c. Percepatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar

Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar sangat dibutuhkan dalam suatu daerah agar dapat memberi kemajuan terhadap suatu negara, khususnya pada Desa Bolli yang memprioritaskan hal tersebut. Perencanaan pembangunan infrastruktur dasar merupakan hal yang sangat fundamental di Desa Bolli, ini didasari pada kebutuhan masyarakat yang sangat perlu untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas.

Dari hasil wawancara peneliti kepada seluruh kepala Dusun terkait dengan Perencanaan pembangunan pemenuhan infrastruktur dasar di Desa Bolli dapat di simpulkan bahwa setiap kepala Dusun mengusulkan program yang bisa membuat perubahan di wilayahnya dan memperhatikan setiap kebutuhan mendesak masyarakat. Setiap kepala dusun hampir mempunyai usulan yang sama dalam wilayahnya, dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dasar setiap kepala dusun mengusulkan sarana air bersih, embun, jalan tani, sarana olahraga dan irigasi.

Untuk mengetahui percepatan pemenuhan infrastruktur dasar ditingkat desa peneliti melakukan wawancara kepada AJ selaku sekretaris desa, mengatakan:

“Ada beberapa perencanaan pembangunan dengan penggunaan Dana Desa di Desa Bolli yaitu sarana air bersih, embung desa, PAUD, drainase/irigasi dan jalan tani program tersebut merupakan hasil usulan semua kepala Dusun dan disimpulkan dalam musrenbang desa, kenapa semua usulan kepala Dusun tidak dimasukkan dalam RPJMDes karena kami fokus pada kebutuhan yang lebih prioritas. Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar harus memikirkan beberapa aspek. Kita harus memperhatikan aspek dari segi sosial, aspek dari segi perekonomian, aspek dari segi kesehatan dan aspek dari segi pendidikan”.

Dari wawancara terkait perencanaan percepatan infrastruktur dasar dapat disimpulkan bahwa perencanaan tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas dan bisa menunjang kebutuhan masyarakat dan tujuan dari pembangunan infrastruktur dasar tersebut agar dapat mengifisienkan tenaga dan biaya dari masyarakat agar bisa menjadikan Desa Bolli sebagai desa yang mandiri.

Jadi implementasi Dana Desa harus berdasarkan perencanaan pembangunan desa yang telah di hasilkan dari kesepakatan bersama seluruh jajaran pemerintah Desa Bolli melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

d. Implementasi Dana Desa

Implementasi Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ada beberapa indikator yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penggunaan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, meningkatkan kapasitas warga dan mendukung kegiatan bumdes. Untuk mengetahui poin tersebut peneliti melakukan wawancara mendalam kepada informan.

a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah desa kepada masyarakat guna memberikan pelayanan yang baik, dalam pemenuhan kebutuhan dasar terbagi menjadi beberapa aspek yaitu sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Untuk memperjelas beberapa aspek tersebut peneliti melakukan wawancara kepada AJ selaku sekretaris desa, mengatakan:

“Untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kita harus memperhatikan beberapa aspek. Dari segi sosial kami memberikan pelayanan sesuai dengan standar operasional pelayanan Desa Bolli, dari segi ekonomi di Desa Bolli masih mengedepankan pembangunan infrastruktur, bantuan dana, bantuan pertanian dan pelatihan, dari segi pendidikan yaitu dengan mendirikan fasilitas terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD), dari segi kesehatan kami mengupayakan agar tenaga kesehatan memberi pelayanan yang baik terhadap masyarakat di Desa Bolli setiap masyarakat akan diberikan pelayanan yang maksimal dan dilakukan secara terstruktur”.

Berdasarkan penjelasan dari sekretaris desa dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi Dana Desa pemerintah Desa Bolli memperhatikan semua aspek agar semua masyarakat dapat menikmati pelayanan yang baik dengan adanya Dana Desa. Dari aspek sosial akan memberikan pelayanan yang sesuai dengan prosedur pelayanan yang ada, Pemenuhan kebutuhan

masyarakat dari aspek ekonomi di Desa Bolli masih mengedepankan pembangunan infrastruktur, bantuan dana, bantuan pertanian dan pelatihan. Penghasilan masyarakat di Desa Bolli paling banyak terdapat dari hasil pertanian dan peternakan seperti padi, cengkeh, gula merah dan peternakan sapi lokal dan didukung dengan bantuan bibit pertanian lain seperti bantuan pertanian, dari segi pendidikan yaitu dengan mendirikan fasilitas terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD), itu merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak usia dini untuk memberikan rangsangan pendidikan terhadap anak usia dini di Desa Bolli dan dari aspek kesehatan mengupayakan agar tenaga kesehatan memberi pelayanan yang baik terhadap masyarakat di Desa Bolli.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan, pemerintah Desa Bolli belum memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang di anggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pelayanan dari setiap aspek belum terlalu maksimal. Pelayanan publik belum maksimal disebabkan tidak aktifnya beberapa aparat desa sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak bisa terlayani dengan baik.

b. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa

Implementasi pemenuhan kebutuhan dasar di Desa Bolli merupakan hal yang harus di prioritaskan oleh pemerintah Desa Bolli, melihat Desa Bolli masih tertinggal dari segi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana. Dalam wawancara peneliti terhadap informan. AN selaku kepala desa, mengatakan:

“Pembangunan sarana dan prasarana merupakan salah satu yang diprioritaskan dalam Desa Bolli terkait dengan perencanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam musrenbang. Sebagian pembangunan ada yang telah di selesaikan dan sudah dinikmati oleh masyarakat. Terkait dengan perencanaan program yang belum terlaksana akan dikerjakan di tahap berikutnya melalui anggaran Dana Desa. Program yang kami sudah jalankan yaitu jalan desa dan jembatan merupakan prioritas utama, PAUD, penyediaan air bersih berupa sumur galian dan sumur bor kemudian kami juga sudah menyediakan drainase”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa

Dalam perencanaan pembangunan pemerintah Desa Bolli memprioritas pembangunan infrastruktur jalan desa dan jembatan. Implementasi pembangunan jalan desa dan jembatan telah terlaksana di lima Dusun yaitu Dusun Bolli Dusun Ciro, Dusun Barugae, Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging. Pembangunan jalan desa dan jembatan di bangun di lima Dusun tersebut selain Dusun Bolli empat Dusun tersebut belum tersentuh aspal sama sekali maka keempat Dusun tersebut menjadi prioritas dalam pembangunan jalan desa. Kemudian penyediaan sarana prasarana yaitu PAUD telah dibangun di Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging. Untuk penyediaan air bersih pemerintah Desa Bolli telah menyediakan sumur galian dan sumur bor dan untuk mendukung petani dibidang pertanian pemerintah Desa Bolli telah membangun drainase.

Untuk mengetahui secara spesifik terkait pembangunan sarana dan prasarana yang telah dibangun atau disediakan peneliti melakukan wawancara terhadap AJ selaku sekretaris desa, mengatakan:

“Jalan desa sudah dibangun melalui anggaran Dana Desa sepanjang 5570 meter, yaitu terdapat di Dusun Ciro, Dusun Barugae, Dusun

Sancereng dan Dusun Maroanging, dan jembatan 8 unit terdapat di Dusun bolli 2 unit, di Dusun Ciro 1 unit, Dusun Barugae 1 unit Dusun Sancereng 2 unit dan Dusun Maroanging 2 unit. Penggunaan anggaran Dana Desa dalam pembangunan jalan desa dan jembatan sekitar 85% dari Rp. 1.245.581.000 anggaran yang diterima Desa Bolli dalam Dana Desa. Kemudian pembuatan PAUD terdapat 2 unit, 1 di Dusun Sancereng dan 1 di Dusun Maroanging, dan sumur 7 unit yang tersebar di setiap Dusun kalau drainase hanya 50 meter di Dusun Sancereng. Dan kami juga sudah membangun jalan tani di Dusun Lawari Dusun Padangloang, Dusun Barugae, Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging”.

Melihat kondisi geografis di Desa Bolli yang di aliri beberapa sungai dalam beberapa Dusun membuat pemerintah Desa Bolli harus merealisasikan sebagian besar Dana Desa untuk membangun jembatan, karena dengan adanya jembatan merupakan penghubung masyarakat kedusun lainnya dan penghubung kewilayah pertanian. Sebelum adanya jembatan masyarakat kesulitan untuk melewati sungai dengan kendaraan, jika musim hujan masyarakat tidak bisa melakukan akses melalui sungai karena sering terjadi banjir. Untuk menyediakan air bersih pemerintah Desa Bolli hanya menyediakan sumur galian dan sumur bor dan itu belum cukup untuk seluruh masyarakat Desa Bolli.

Untuk mengetahui implementasi Dana Desa dalam sarana dan prasarana dari tujuh Dusun peneliti melakukan wawancara kepada kepala Dusun Bolli, kepala Dusun Lawari, kepala Dusun Padangloang, kepala Dusun Ciro, kepala Dusun Barugae, kepala Dusun Sancereng dan kepala Dusun Maroanging. Hasil wawancara dari setiap dusun peneliti menyimpulkan bahwa di Dusun Bolli telah di bangun 2 unit jembatan, di Dusun Lawari ini telah di bangun jalan tani untuk, di Dusun Padangloang

telah di bangun jalan tani dan sumur, di Dusun Ciro telah dibangun jalan desa sudah diperbaiki dan sebentar lagi sebagian jalan desa akan dibeton, di Dusun Barugae jalan desa, Jalan tani dan wc umum. Jalan desa di Dusun Sancereng hampir seluruh sudah diperbaiki dengan pembuatan talud dan pengerasan dan jembatan ada satu dalam proses pembangunan dan sebagian sudah dinikmati oleh masyarakat, drainase dan PAUD. Sepanjang jalan desa di Maroanging hampir semua sudah diperbaiki dan jembatan sudah di bangun untuk menghubungkan masyarakat kewilayah pertanian dan perkebunan dengan memperbaiki jalan tani.

Berdasarkan observasi, implementasi Dana Desa di Desa Bolli terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana sebagian sudah terlaksana dengan baik dan jika di amati dengan baik pemerintah Desa Bolli fokus pada pembangunan jalan desa dan pembangunan jembatan sedangkan penyediaan saluran air bersih tidak sesuai keinginan masyarakat karena masyarakat membutuhkan saluran air bersih tetapi pemerintah hanya menyediakan sumur galian dan sumur bor dan masyarakat. Dari sektor pertanian penyediaan embun belum terlaksana dan itu merupakan kebutuhan utama petani di Desa Bolli. Di Desa Bolli masih ada kebutuhan prioritas masyarakat yang belum terpenuhi.

c. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

Tujuan pengembangan ekonomi lokal yaitu untuk menciptakan kekayaan, menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki kualitas

hidup masyarakat. Peran pemerintah desa terhadap pengembangan ekonomi lokal yaitu bagaimana agar potensi ekonomi yang ada di didesanya bisa dikelola dengan baik sehingga bisa memberikan nilai positif terhadap masyarakat. Dengan mengandalkan ekonomi lokal, masyarakat dapat lebih kreatif dalam menciptakan suatu produksi yang dapat dipasarkan.

Untuk mengetahui implementasi Dana Desa dalam hal pengembangan ekonomi lokal di Desa Bolli, peneliti melakukan wawancara kepada AJ selaku sekretaris desa, mengatakan:

“Pengembangan ekonomi lokal yang ada di Desa Bolli ini berupa pelatihan dan menciptakan produk dengan mengandalkan hasil pertanian sendiri, pemanfaatan hasil pertanian yaitu dengan adanya pembuatan kripik pisang di Dusun Lawari dengan mengandalkan hasil pertanian yang merupakan bantuan bibit pisang yang diberikan oleh pemerintah Desa Bolli. Selain itu pemerintah Desa Bolli memberikan pelatihan atau kursus kepada masyarakat yang punya bakat dalam bidang konveksi yang ada di setiap Dusun dan pelatihan pembuatan bakso di Dusun Lawari. Kami selaku pemerintah desa memfasilitasi masyarakat dengan membuat pelatihan dan penyertaan modal melalui anggaran Dana Desa”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap sekretaris desa dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Bolli berharap dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat yang berpartisipasi. Dampak yang di hasilkan yaitu masyarakat desa yang telah mendapat pelatihan dapat mendirikan usaha konveksi dan warung bakso sehingga dapat memberikan pemasukan tambahan kepada masyarakat. Walaupun tidak melibatkan semua masyarakat tapi sebagian dapat menikmati hasil pelatihan yang telah diberikan oleh pemerintah desa. Dalam meningkatkan usaha atau pemberian pelatihan terhadap masyarakat pemerintah Desa Bolli menggunakan sebagian Dana Desa dalam pemberian modal atau mengadakan program

pelatihan untuk mendukung masyarakat dalam mengembangkan ekonomi lokal yang di Desa Bolli.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa pengembangan potensi ekonomi lokal tidak sesuai dengan konsep pengembangan ekonomi masyarakat yang menekankan proses memberikan kemampuan kepada masyarakat dengan mengadakan pelatihan, mendorong atau memotivasi individu agar lebih mempunyai kemampuan untuk menentukan pilihan hidupnya. Selanjutnya dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

d. Pelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan

Keadaan geografis di Desa Bolli sangat potensial dapat dilihat dari keberagaman sumber daya alam seperti hutan lindung, hamparan lahan perkebunan, destinasi wisata air terjun dan situs pemakaman bersejarah, jika di dimanfaatkan dapat menjadikan Desa Bolli menjadi desa yang mandiri. Dengan memanfaatkan keberagaman sumber daya alam dan lingkungan yang potensial tersebut dapat memberikan pemasukan yang memadai untuk modal pengembangan pembangunan.

Dalam implementasi Dana Desa terkait pelestarian sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan peneliti melakukan wawancara kepada AJ selaku sekretaris desa, mengatakan:

“Dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan di Desa Bolli kami sudah berusaha memperbaiki hutan pinus yang ada di Dusun Barugae untuk dijadikan tempat wisata alam dan kami juga sudah memperbaiki situs makam bersejarah yang ada di Desa Bolli”.

Dari wawancara peneliti terhadap informan dapat disimpulkan bahwa Ada dua hal yang di lakukan pemerintah Desa Bolli dalam pelestarian sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yaitu upaya untuk menciptakan lokasi wisata pada hutan pinus untuk menarik wisatawan agar bisa memberikan nilai tambah atau pengasilan kepada masyarakat yang mengelolanya kemudian pelestarian situs makam yang ada di Desa Bolli dengan maksud untuk menghargai makam leluhur. Pemerintah Desa Bolli sejauh ini hanya memanfaatkan hutan pinus sebagai tempat wisata dan pemeliharaan situs pemakaman bersejarah. Dampak yang diberikan tidak terlihat sama sekali.

Berdasarkan observasi peneliti terhada pelestarian sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bahwa pemerintah desa Bolli hanya memanfaatkan sebagian kecil sumber daya alam untuk dikelola jika dilihat sumber daya alam yang di desa Bolli sangat mendukung untuk dikelola dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Evaluasi Dana Desa

Evaluasi Dana Desa yang dikeluarkan oleh menteri keungan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dalam Dana Desa yaitu output dan outcome Dana Desa, dampak Dana Desa terhadap kemandirian desa, kinerja penyaluran dan penyerapan, kendala dalam penyaluran dan penggunaan itu dilakukan bagaiman kita bisa melihat kalkulasi dari implementasi Dana Desa dimanfaatkan untuk apa saja selama tiga tahap penyaluran.

a. Output Dan Outcome Dana Desa

Output dan outcome dana desa merupakan hasil yang dicapai dalam pengelolaan dana desa dan untuk mengetahui hasil itu dilakukan evaluasi dengan melihat output dan outcome dari dana desa. Untuk mengetahui output dan outcome Dana Desa peneliti melakukan wawancara kepada AJ selaku sekretaris desa, AJ menjelaskan secara detail:

“Output Dana Desa di Desa Bolli berdasarkan RPJMDes yaitu jalan desa sepanjang 5.570 meter terdapat di Dusun Ciro, Dusun Barugae, Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging, jembatan 8 unit yang tersebar di lima Dusun yaitu Dusun bolli 2 unit, Dusun Ciro 1 unit, Dusun Barugae 1 unit, Dusun Sancereng 2 unit dan Dusun Maroanging 2 unit. Sambungan air bersih kami belum realisasikan begitupun embung desa. PAUD terdapat 2 unit yang terdapat di Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging. Drainase atau irigasi 50 meter terdapat di Dusun Sancereng, jalan tani sepanjang 400 meter terdapat di Dusun Lawari sepanjang 150 Dusun padang loang sepanjang 50 meter, Dusun Barugae sepanjang 100 meter dan Dusun Sancereng sepanjang 100 meter Itulah hasil Dana Desa di Desa Bolli dan outcome dana desa di Desa Bolli yaitu Selama adanya Dana Desa, pemerintah dapat mengurangi angka kemiskinan dari angka 299 ke angka 165 dalam 5 tahun. Tapi sepenuhnya bukan karena bantuan modal yang diberikan kepada masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal tapi dengan adanya bantuan sosial dari pemerintah pusat”.

Berdasarkan obsevasi peneliti bahwa jumlah hasil pembangunan tersebut benar terdapat di lapangan dan sebagian masih belum terlaksana. Namun dari hasil tersebut tidak terealisasikan dengan baik dengan melihat kualitas tidak sesuai apa yang di harapkan masyarakat, hal tersebut realisasi sebagian program tidak terlalu maksimal.

a. Dampak Dana Desa Terhadap Kemandirian Desa

Dampak Dana Desa terhadap kemandirian Desa merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi Dana Desa karena salah satu tujuan Dana Desa yaitu untuk mewujudkan desa yang mandiri.

Untuk mengetahui dampak Dana Desa di Desa Bolli peneliti melakukan wawancara terhadap AJ selaku sekretaris desa, mengatakan:

“Dampak Dana Desa terhadap kemandirian desa di Desa Bolli tidak terlalu signifikan di akibatkan dari ketertinggalan Desa Bolli. Ketertinggalan tersebut mengakibatkan pemerintah Desa Bolli harus memaksimalkan pembangunan yang ada di Desa Bolli. Selama adanya Dana Desa pemerintah Desa Bolli hanya memprioritaskan empat Dusun yaitu dusun ciro, dusun barugae, dusun sancereng dan dusun maroanging untuk di lakukan pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan, sehingga tiga Dusun yaitu Dusun bolli, Dusun Lawari dan Dusun Padangloang tidak terlalu merasakan dampak dari Dana Desa”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sekretaris desa dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Bolli memprioritaska empat Dusun yaitu dusun ciro, dusun barugae, dusun sancereng dan dusun maroanging untuk di lakukan pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan karena ke empat Dusun tersebut memang ketinggalan pembangunan sehingga Dusun lainnya tidak terlalu diperhatikan pembangunannya atau kepentingan masyarakat. Itulah yang menjadi penyebab sehingga Desa Bolli bisa menjadi desa yang mandiri.

b. Kinerja Penyaluran Dan Penyerapan

Dalam penyaluran dan penyerpan Dana Desa merupakan kerja dari kaur keuangan desa, untuk memperjelas penyaluran dan penyerapan Dana

Desa di Desa Bolli peneliti melakukan wawancara kepada AW selaku kaur keungan desa, mengatakan:

“Dalam kinerja penyaluran dan penyerapan terealisasi dengan baik karena laporan keungan dari Desa Bolli di selesaikan dengan baik sehingga dalam penyaluran Dana Desa di Desa Bolli tidak pernah mendapat kendala”.

Dari wawancara peneliti kepada kaur keungan bahwa setiap laporan keungan dilakukan dengan baik sehingga tidak mendapat kendala, untuk membuktikan pernyataan dari kaur keungan sebagai penanggung jawab keungan peneliti melakukan wawancara kepada ketua BPD selaku salah satu pihak yang mengawasi di luar dari struktur desa. HN selaku ketua BPD, mengatakan:

“Saya selaku BPD Desa Bolli selalu melakukan pengawasan terhadap Dana Desa dan bekerja sama dengan baik dengan pemerintah Desa Bolli agar penyaluran dan penyerapan Dana Desa berjalan dengan baik, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Bolli agar terus mengawasi Dana Desa”.

Berdasarkan hasil wawancara dari kaur keungan dan ketua BPD dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keungan Dana Desa di Desa Bolli terbilang cukup baik karena dalam penyaluran anggaran Dana Desa tidak pernah mendapat kendala. Dari segi pengawasan BPD berharap semua masyarakat dapat aktif mengawasi anggaran Dana Desa.

c. Kendala Dalam Penyaluran Dan Penggunaan

Setiap penyaluran dan penggunaan suatu anggaran pasti akan mengalami kendala, apakah itu kendala yang dapat menghambat proses penyaluran atau penggunaan atau kendala yang sifatnya sementara. Sama

halnya dengan Dana Desa pasti terdapat kendala dalam penyaluran dan penggunaannya.

Untuk mengetahui penyaluran dan penggunaan dana desa peneliti melakukan wawancara terhadap AW selaku kaur keuangan Desa Bolli, mengatakan:

“Penyaluran dan penggunaan Dana Desa tidak pernah mendapat kendala yang berarti. Penyaluran Dana Desa di Desa Bolli berjalan dengan baik tanpa kendala. pelaporan hasil realisasi selalu tepat waktu sehingga penyaluran tahap berikutnya tersalurkan dengan cepat. Sedangkan penggunaan Dana Desa di Desa Bolli selalu berpedoman dengan Rencana Anggaran Bangunan (RAB) sehingga tidak mendapat kendala atau masalah dalam penggunaan. Hanya saja terjadi masalah mekanisme pada pihak ketiga selaku penanggung jawab material, penggunaan material yang tidak baik kualitasnya sehingga berdampak pada kualitas bangunan”.

Dari hasil wawancara kepada kaur keuangan dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran dan penggunaan Dana Desa di Desa Bolli tidak mendapat kendala yang berarti selain dari pihak ketiga yang ingin mengambil keuntungan lebih dari penyaluran dan penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa apa yang dikatakan oleh kaur keuangan memang benar, pihak ketiga hanya mencari keuntungan tanpa memperhatikan kualitas bangunan. Pihak ketigalah yang menimbulkan masalah dalam penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Kemudian penggunaan anggaran Dana Desa tidak efektif karena penggunaan anggaran Dana Desa tidak transparan dalam penyalurannya dan penggunaannya.

C. PEMBAHASAN

i. Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Perencanaan penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa sesuai dengan RPJMN yang di uraikan oleh Sri Mulyani (2017: 25) meliputi pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan dan Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar.

a. Pemberdayaan ekonomi lokal

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara peneliti terhadap informan bahwa program tersebut direncanakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pada wilayah yang terdapat potensi desa dan bisa mengembangkan produk unggulan desa yang ditargetkan atau sesuai apa yang direncanakan pemerintah Desa Bolli bahwa dalam desa wilayah Desa Bolli akan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui anggaran Dana Desa. Hal tersebut sesuai asas-asas pengaturan desa terkait dengan pemberdayaan yang di jelaskan oleh (Sri Mulyani 2017: 8) bahwa pemberdayaan yaitu upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Hal demikian serupa apa yang dikatakan oleh Moeljarto (1998:148) bahwa terkait dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada

pengembangan sumberdaya manusia, penciptaan peluang usaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat

Perencanaan pemberdayaan ekonomi lokal di desa Bolli cukup baik karena apa yang rencanakan mengarah kepada kebutuhan prioritas masyarakat desa hal tersebut didukung sejalan dengan teori yang ada. Dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa Bolli di harapkan dapat berjalan sesuai apa yang di inginkan oleh masyarakat desa Bolli kedepannya.

Penulis berpendapat bahwa perencanaan pemberdayaan ekonomi lokal di desa Bolli sudah tepat namun masih perlu dikembangkan agar sumber daya alam yang ada di desa Bolli bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menciptakan produk lokal yang dapat meningkat penghasilan masyarakat desa.

b. Penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan

Penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan merupakan hal yang diprioriaskan di Desa Bolli untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan akselerasi kewilayah pertumbuhan, dengan adanya Dana Desa pemerintah dapat memperbaiki akses kewilayah pertumbuhan dengan memperbaiki jalan desa dan membangun jembatan. Dengan dukungan dari masyarakat Desa Bolli maka pelaksanaan jalan desa dan jembatan merupakan suatu kekuatan untuk merealisasikan anggaran Dana Desa, program tersebut merupakan prioritas dari pemerintah Desa Bolli. Dengan di bangun jalan desa dan jembatan dapat

memudahkan masyarakat dalam melakukan akselerasi kewilayah pertumbuhan sehingga perekonomian masyarakat berjalan dengan baik.

Dari hasil penelitian terkait dengan penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan sesuai dengan prinsip penggunaan dana desa yaitu kebutuhan prioritas untuk mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

c. Percepatan pemenuhan kebutuhan dasar

Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar di Desa Bolli merupakan hal yang di perhatikan oleh pemerintah desa. Perencanaan kebijakan dari pemerintah Desa Bolli yaitu saluran air bersih, PAUD, drainase, embun, dan jalan tani. Maksud dari pembangunan infrastruktur dasar tersebut yaitu untuk memudahkan dan mendukung aktivitas masyarakat, hal yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan kebijakan tersebut yaitu bagaimana kebijakan tersebut mendapat dukungan dari masyarakat desa dalam setiap dusun sehingga bisa direalisasikan dengan lancar, selain itu perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam setiap kebijakan pasti akan memiliki kelemahan, dan kelemahan yang ada dalam pembangunan infrastruktur dasar yaitu jika menjadi prioritas maka kebijakan yang lain akan terabaikan. Kemudian jika dilihat dari kebijakan tersebut maka peluang yang muncul yaitu respon sebagian besar masyarakat akan sangat baik dengan pelibatan dalam pembangunan sarana dan prasarana tapi hal itu belum tentu

mampu melibatkan semua masyarakat desa dimana dalam setiap dusun tidak ada kebijakan yang direalisasikan.

Dalam perencanaan penggunaan anggaran dana desa di Desa Bolli, ditentukan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan hal tersebut sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh Siagian (2016:88) bahwa perencanaan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dari hasil perencanaan pemerintah Desa Bolli dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bolli yang dihasilkan melalui musyawarah rencana pembangunan desa untuk mencapai tujuan maka ditentukan beberapa program yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun kedepan di desa Bolli berdasarkan pembangunan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4: Tabel perencanaan penggunaan dana desa**Perencanaa penggunaan dana desa di Desa Bolli**

No	Perencanaan	Uraian	Lokasi	Ket
1	Pemberdayaan ekonomi lokal	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan kripik pisang - Pelatihan menjahit - Pelatihan pembuatan bakso - Bantuan modal usaha fotografer dan somel 	<ul style="list-style-type: none"> - Dusun Lawari - Desa Bolli - Desa Bolli - Dusun Lawari dan Dusun Ciro 	
2	Penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan desa - Jembatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dusun Ciro, Dusun Barugae, Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging - Dusun Bolli, Dusun Ciro, Dusun Barugae, Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging 	
3	Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Saluran air bersih - Embun desa - PAUD - Irigasi/drainase - Jalan tani 	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Bolli 	

1) Pemberdayaan ekonomi lokal

Pemberdayaan ekonomi lokal yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pada wilayah yang terdapat potensi desa dan bisa mengembangkan produk unggulan desa yang ditargetkan atau sesuai apa yang direncanakan pemerintah Desa Bolli bahwa dalam desa wilayah Desa Bolli akan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui anggaran Dana Desa. Perencanaan pada pemberdayaan ekonomi lokal di Desa Bolli yaitu. Pembuatan kripik pisang di Dusun Lawari, pelatihan menjahit dan pelatihan membuat bakso akan melibatkan semua

masyarakat Desa Bolli yang ingin berpartisipasi dalam pelatihan tersebut kemudian bantuan modal kepada BUMDes akan diberikan kepada BUMDes yang ada di Desa Bolli yaitu terdapat dua BUMDes yaitu fotografer yang ada di Dusun Lawari dan somel yang ada di Dusun Ciro.

2) Penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan

Perencanaan penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan yaitu bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan akselerasi kewilayah pertumbuhan agar perekonomian masyarakat dapat meningkat dengan adanya akses penghubung kewilayah pertumbuhana. Perencanaan penciptaan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan diprioritaskan pada pembangunan jalan desa yang ada di empat dusun yaitu Dusun Ciro, Dusun Barugae, Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging karena keempat dusun tersebut masih tertinggal dari pembangunan infrastruktur jalan. Kemudian jembatan akan di bangun di lima dusun yaitu Dusun Bolli, Dusun Ciro, Dusun Barugar, Dusun Sancereng dan Dusun Maroanging karena pada wilayah dusun tersebut banyak dialiri sungai.

3) Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar

Perencanaan pemenuhan infrastruktur dasar bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dalam mendukung kebutuhan masyarakat agar beban masyarakat dapat berkurang dengan adanya dukungan pemerintah desa dengan merencanakan pembangunan seperti saluran air

bersih, embun desa, PAUD, irigasi dan jalan tani itu direncanakan disetiap wilayah yang membutuhkan pembangunan tersebut.

2. Implementasi Dana Desa

a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar di Desa Bolli merupakan hal yang sangat di perhatikan oleh pemerintah Desa Bolli. Pemerintah Desa Bolli berusaha untuk memperbaiki segala aspek, dengan memperbaiki aspek tersebut diharapkan Desa Bolli dapat lebih berkembang. Tapi berdasarkan obsevasi menunjukkan bahwa pelayanan dari setiap aspek pemenuhan kebutuhan dasar di desa Bolli belum memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pelayanan dari setiap aspek belum maksimal. Hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

b. Pembangunan sarana dan prasarana desa

Pemerintah desa Bolli belum melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana yang di anggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa yaitu penyediaan air bersih yang dianggap kebutuhan mendesak masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Bolli tidak sesuai dengan prinsip penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa prinsip

kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat. Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan sarana dan prasana desa.

Penulis berpendapat bahwa pembangunan sarana dan prasarana harus berdasarkan prinsip prioritas yang mengedepankan kebutuhan masyarakat, dengan mendengar pendapat dari sebagian besar masyarakat dan melihat kebutuhan mendesak masyarakat. Prinsip penggunaan dana desa itu sendiri harus mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat. Prinsip itu harus menjadi acuan setiap desa dalam merealisasikan program dengan menggunakan dana desa.

c. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

Upaya pemerintah Desa Bolli dalam pengembangan ekonomi lokal yaitu dengan memberikan bantuan modal kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat dengan mengadakan pelatihan kepada masyarakat, memberikan pengetahuan terhadap masyarakat dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan potensi ekonomi

di Desa Bolli agar angka kemiskinan dan ekonomi masyarakat dapat meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pengembangan potensi ekonomi lokal di Desa Bolli sesuai dengan prinsip penggunaan Dana Desa yang telah ditentukan oleh pemerintah bahwa swakelola dan berbasis sumber daya desa yaitu mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.

Penulis berpendapat bahwa Pemberian bantuan modal untuk meningkatkan ekonomi lokal yaitu harus kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria, yaitu memberikan modal kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan modal dari pemerintah untuk pengembangan usaha kemudian pemberian modal diberikan kepada masyarakat yang layak menerima bantuan tersebut dengan alasan di bawah standar ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar angka kemiskinan bisa berkurang. Pemberian bantuan modal di desa Bolli sudah cukup baik namun harus perlu diperhatikan lagi apakah sudah tepat sasaran atau belum, jangan mengedepankan prinsip kekeluargaan tapi harus dengan kriteria.

d. Pelestarian Sumber Daya Alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Pelestarian Sumber Daya Alam dan lingkungan secara berkelanjutan di Desa Bolli tidak dilaksanakan dengan maksimal melihat potensi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup sangat mendukung tapi tidak di kelolah dengan baik oleh pemerintah Desa Bolli.

Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan tidak mendapat perhatian dari pemerintah Desa Bolli melihat minimnya pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang merupakan sumber yang bisa menghasilkan potensi dan memberi dampak yang luas terhadap masyarakat. dalam mengelolah sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan pemerintah desa harus melibatkan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Penulis berpendapat bahwa pelestarian sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan harus memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk di manfaatkan sebaik mungkin agar bisa menghasilkan produk lokal yang berkualitas serta tetap menjaga lingkungan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Evaluasi Dana Desa

Evaluasi Dana Desa dilakukan mulai tingkat desa sampai tingkat pusat, evaluasi tingkat desa dilakukan oleh kepala desa bersama seluruh jajaran pemerintah desa. Evaluasi dilakukan untuk melihat apa yang telah dikerjakan melalui anggaran Dana Desa selama. Evaluasi Dana Desa merupakan penilaian atau hasil dari suatu implementasi Dana Desa. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui Output dan Outcome Dana Desa, dampak Dana Desa terhadap kemandirian desa, kinerja penyaluran dan penyerapan, kendala dalam penyaluran dan penggunaan.

a. Output dan outcome Dana Desa

Penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan memastikan bahwa ketercapaian output dan outcame dapat lebih maksimal.

Pemerintah desa Bolli telah merilis hasil yang dicapai dari penggunaan anggaran dana desa. Evaluasi dilakukan untuk melihat hasil dari apa yang telah rencanakan, Siagian (2005:45) mendefenisikan bahwa evaluasi sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyataanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Evaluasi merupakan langkah akhir dalam formulasi kebijakan publik untuk mengetahui hasil yang telah dicapai dan untuk mengetahui apakah tujuan yang ingin dicapai sebelumnya terlaksana atau tidak.

Output dan outcome Dana Desa di Desa Bolli dapat dipahami bahwa Desa Bolli fokus pada pengembangan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan desa dan jembata melihat realisasi dari jalan desa sepanjang 5570 meter yang sudah di perbaiki dan jumlah jembatan sebanyak 8 unit sebagian dilakukan perenovasian. Banyak yang telah dikerjakan oleh pemerintah Desa Bolli melalui anggaran Dana Desa walaupun belum maksimal dalam implementasinya, termasuk penurunan angka kemiskinan di Desa Bolli melalui pemberdayaan.

Tabel 4.5: Output Dana Desa di Desa Bolli**Output dana desa di Desa Bolli**

No.	Uraian	Realisasi	Lokasi	Keterangan
1	Jalan desa	5.570 meter	- Dusun Ciro - Dusun Barugae - Dusun Sancereng - Dusun Maroanging	Kurang maksimal
2	Jembatan	8 unit	- Dusun Bolli - Dusun Ciro - Dusun Barugae - Dusun Sancereng - Dusun Maroanging	Kurang maksimal
3	Sambungan air	-	-	Tidak terlaksana
4	Embung desa	-	-	Tidak terlaksan
5	Paud	2 unit	- Dusun Sancereng - Dusun Maroanging	Baik
6	Sumur	7 unit	- Dusun Bolli - Dusun Lawari - Dusun Padangloang - Dusun Ciro - Dusun Barugae - Dusun Sancereng - Dusun Maroanging	Baik
7	Drainase/irigasi	50 meter	- Dusun Sancereng	Baik
8	Jalan tani	400 meter	- Dusun Lawari - Dusun Padangloang - Dusun Barugae - Dusun Sancereng	Tidak maksimal

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a) jalan desa

Jalan desa realisasinya 5.570 meter dilaksanakan di lima Dusun yaitu dusun ciro, dusun barugae, dusun sancereng dan dusun maroanging dari keteranganya kurang maksimal di sebabkan dari kualitas talut tidak maksimal ketahanannya dan masih banyak genangan air di jalan yang pernah dikerjakan. Realisasi tersebut dimulai sejak adanya Dana Desa.

b) Jembatan

Telah ada 8 unit jembatan yang telah direalisasikan yang terdapat di lima Dusun yaitu Dusun bolli 2 unit jembatan, Dusun Ciro1 unit jembatan , Dusun Barugae 1 unit jembatan, Dusun Sancereng 2 unit jembatan dan Dusun marroanging 2 unit jembatan. Dalam keterangannya kurang baik dengan adanya salah satu jembatan di Dusun Sancereng telah roboh akibat banjir, dengan robohnya jembatan tersebut dikarenakan konstruksi pada jembatan tersebut tidak maksimal.

c) Sambungan air

Sambungan air terdapat dalam perencanaan pembangunan tetapi tidak direalisasikan padahal sambungan air sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

d) Embung desa

Tidak terealisasi padahal salah satu yang dibutuhkan oleh petani yang di Desa Bolli dalam mengairi sawahnya.

e) PAUD

Paud telah di bangun 2 unit yaitu di dusnu Sancereng 1 unit dan Dusun maroangin 1 unit. Fasilitas paud digunakan oleh masyarakat dengan baik

f) Sumur

Sumur telah dibangun 7 unit yaitu Dusun bolli 1 sumur Dusun Padangloang 1 unit sumur, Dusun Ciro 1 unit, Dusun Barugae 1 unit

sumur dan 1 unit sumur bor Dusun Sancereng 1 unit sumur dan Dusun Maroanging 1 unit sumur. Pembangunan sumur terdapat dua kategori yaitu sumur galian dan sumur bor. Dari 7 sumur tersebut semuanya digunakan oleh masyarakat dengan baik.

g) Drainase/irigasi

Drainase/ irigasi dibangun di Dusun Sancereng sepanjang 50 meter dan digunakan oleh masyarakat dengan baik.

h) Jalan tani

Jalan tani telah dibangun sepanjang 400 meteri dalam tiga Dusun yaitu Dusun Lawari sepanjang 150 meter, Dusun Padangloang sepanjang 50 meter, Dusun Barugae sepanjang 100 meter dan Dusun Sancereng sepanjang 100 meter. Pekerjaan tersebut hanya perintisan tidak ada pengerasan dan pembuatan talut sehingga tidak bisa dgunakan oleh masyarakat dengan baik.

Dalam 5 tahun pemerintah Desa Bolli berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 55% dari angka 299 ke angka 165 dengan bantuan modal dan peningkatan kapasitas warga walaupun sepenuhnya keberhasilan itu bukan dari Dana Desa sepenuhnya melainkan adanya bantuan pemberdayaan keluarga harapan.

Penggunaan dana desa di desa Bolli kedepannya harus memaksimalkan program yang yang telah direalisasikan kemudian melaksanakan program yang merupakan kebutuhan mendesak masyarakat seperti saluran air bersih dan irigasi pertanian dengan memanfaatkan

anggaran dana desa sebaik mungkin di desa Bolli maka program yang belum maksimal dan belum terlaksana maka bisa diselesaikan dalam beberapa tahun kedepan.

b. Dampak Dana Desa terhadap kemandirian desa

Dana desa menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian desa yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status desa hal tersebut tidak terjadi demikian pada Desa Bolli. Dampak Dana Desa terhadap kemandirian di Desa Bolli belum berpengaruh signifikan karena fokus dalam pembangunan infrastruktur pada empat Dusun untuk mengejar ketertinggalan sehingga tiga Dusun lainnya tidak terlalu mendapat perhatian dari pemerintah Desa Bolli. Hal tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah Desa Bolli tidak memperhatikan semua wilayah yang terdapat di Desa Bolli.

Jika dilihat dari letak geografis desa Bolli yang terletak pada dataran pegunungan dan di aliri beberapa sungai selain itu desa Bolli terbagi atas tiga wilayah dusun yang merupakan jaraknya cukup jauh untuk ditempuh sehingga membutuhkan banyak anggaran untuk meningkatkan pembangunan inrastruktur di Desa Bolli.

c. Kinerja penyaluran dan penyerapan

Kinerja penyaluran dan penyerapan anggaran Dana Desa di Desa Bolli terbilang cukup baik karena tidak pernah mendapat kendala, itu merupakan hasil kerja keras dari pemerintah Desa Bolli yang selalu cepat dalam mengerjakan laporan keungan terkait Dana Desa. Penyaluran dan penyerapan anggaran Dana Desa di Desa Bolli dapat kita pelajari bahwa

pemerintah Desa Bolli memperhatikan kecepatan dan ketepatan dalam menyusun laporan keuangan sehingga dalam penyaluran anggaran tidak pernah mendapat kendala.

Jika penyaluran berdasarkan dengan penyaluran dari RKUN ke RKUD dan RKUD ke RKD berjalan baik maka kinerja dalam penyaluran dan penyerapan dana desa maka tidak ditemui kendala yang berarti hal demikian sesuai dengan kinerja penyaluran dan penyerapan dana desa di Desa Bolli yang tidak mendapat kendala yang berarti.

d. Kendala Dalam Penyaluran Dan Penggunaan

Kendala penyaluran terjadi pada tata cara penghitungan belum sesuai ketentuan, laporan realisasi belum disampaikan dan penyaluran tahap II pada bulan terakhir kemudian kendala dalam penggunaan terletak pada penggunaan diluar prioritas, pengeluaran tidak didukung bukti, pekerjaan oleh pihak ketiga, pajak tidak sesuai ketentuan, desa belum mengenal mekanisme uang persediaan dan belanja diluar anggaran.

Kendala Dalam Penyaluran dan Penggunaan anggaran Dana Desa di desa Bolli hanya terletak dari pihak ketiga selaku penanggung jawab perlengkapan material bangunan yang hanya mencari keuntungan dari Dana Desa. Selain itu tidak ada kendala berarti yang berarti. Berkaitan dengan hal penyaluran dan penggunaan Dana Desa pihak ketiga hanya mengedepankan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kebaikan wilayah Desa Bolli.

Menurut pendapat penulis, terkait dengan penyaluran dan penggunaan dana desa di desa Bolli terbilang cukup baik karena dalam penyalurannya tidak mendapat kendala yang berarti selain dari pihak ketiga yang hanya mencari keuntungan, selain itu tidak ditemukan masalah lain dalam penyaluran dan penggunaan dana desa di desa Bolli.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Untuk melihat hasil dari implementasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian yaitu:

1. Perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di desa Bolli dilaksanakan melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbang) dengan melibatkan semua unsur pemerintahan desa Bolli untuk menghasilkan rencana pembangunan sesuai RPJMdes melalui musrenbang. Dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat pemerintah desa Bolli merencanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang dianggap sangat diprioritaskan di setiap dusun.
2. Implementasi Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Bolli fokus pada pembangunan infrastruktur pada 4 dusun dari 7 dusun yang ada di desa Bolli, untuk mengejar percepatan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Desa Bolli sebagian sudah terealisasi namun kualitas dari bangunan tidak maksimal di pengaruhi dari penanggung jawab material hanya mencari keuntungan semata. Pemerintah Desa Bolli mengabaikan sebagian program yang telah direncanakan yang merupakan kebutuhan mendesak masyarakat. Sedangkan Pemberdayaan masyarakat masih kurang efektif disebabkan minimnya perhatian

pemerintah Desa Bolli terhadap potensi ekonomi yang ada di Desa Bolli. Pelatihan yang telah di adakan tidak ada orientasi atau tindak lanjut dan dukungan modal terhadap usaha tidak lagi efektif disebabkan karena tidak lagi diperhatikan oleh pemerintah Desa. Berdasarkan hasil implementasi Dana Desa di Desa Bolli yang masih kurang efektif belum mampu memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat sehingga belum bisa menjadikan Desa Bolli sebagai Desa yang mandiri

3. Evaluasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Bolli belum mampu membuat desa Bolli menjadi desa yang mandiri disebabkan dari faktor geografis desa Bolli dan adanya program pemerintah desa yang tidak terlaksana yang dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa Bolli. Berdasarkan penyerapandan penyaluran dana desa di desa Bolli berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada dan penggunaannya sesuai dengan rencana anggaran bangunan (RAB), kendalanya terletak pada pihak ketiga yang mencari keuntungan dari anggaran dana desa.

B. SARAN

1. Dalam implementasi dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat rencanakan program yang merupakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Prioritaskan pembangunan sumber daya manusia yang sesuai dengan karakter masyarakat melalui pelatihan yang bisa memberi masyarakat pengetahuan yang memadai melalui anggaran dana desa.

3. Maksimalkan pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan kebutuhan masyarakat.
4. Manfaatkan dana desa dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal Said. 2004. *Kebijakan publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- _____. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Bayu Suryaningrat. 1976. *Pemerintahan Dan Administrasi Desa*. Bandung: Ghalia.
- Barata, Atep A. 2004. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Bintarto,R. 1983. *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Cangara, Hafied. 2014. *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Daldjoeni. 2003. *Geografi Kota Dan Desa Untuk Mahasiswa Dan Guru SMU*. Bandung: Alumni.
- Dunn,William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Sofyan. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil, C.S.T. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- _____. 1983. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Nasional.
- Kotler Dan Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga

- Moeljarto, T. 1998. *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis, Konsep, Arah Dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Moenir A.S. 1998. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyadi Deddy. 2018. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- _____. 2008. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Prioritas Penggunaan Dana Desa* . Lembaran RI Tahun 2014, No.5. Sekretariat Negara.
- _____. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Lembaran RI Tahun 2017, Sekretariat Negara. Jakarta
- Prijono, Onny S Dan Pranarka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Purnomomo, Setiawan H. Dan Zlkieflimansyah. 1999. *Manajemen Strategi Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Purwanto, Agus E. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik Dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rangkuti, Freddy. 2013. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, Dan OCAI*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Rypley, Randall B. And Grace A. Fraklin. 1982. *Bureaucracy And Public Implementation*. Hommewood: The Dorsey Press.
- Salusu,J. 2006. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Siagian, Sondang P. 2016. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- _____. 2005. *Kiat Meningkatkan Produktivitas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sjafrizal. 2009 *.Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Baduose Media.
- Soenardjo, Unang. 1984. *Pemerintah Desa Dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito..
- Sudirwo, D. 1985. *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Aksara
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alafabet.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta .
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemebrdayaan Masyarakat Dan Dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Supriatna, Tjahya. 1998. *Administrasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Nimas Multima.

Surmayadi, Nyomam. I. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama

Tim Visi Yustisida. 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: Visimedia.

Uin-Suska.Repository. 2020. *Konsep Implementasi*. Diakses Dari Bab II Landasan Teori, Pada 28 Februari 2020.

Uma, Repository. 2019. *Landasan Teori Dan Kerangka Konseptual Dana Desa*, Diakses Dari Https://Www.Kerangka Konseptual Dana Desa.Com, Pada 9 Agustus 2019.

Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Widjaja HAW. 2014. *Otonomi desa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

_____ 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijaka Publik teori dan proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

_____ 2005. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Sumber tulisan

Syukrial . 2015. *Materi Kuliah Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan*. Padang. Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Nunik Chumida, 2015. *Implementasi Kebijakan Dana Desa (Dd) Dalam Menunjang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Di Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Tahun 2015-2016)*.

Muhammad Luthfi Musthafa. 2016. *Implementasi Pencairan Dan Pengelolaan Dana Desa (Dd) Dan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.*

Munirah. 2017. *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lubuk Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.*

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 berisi tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Desa dan Aparat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD).

Tentang Penulis



Ali Yusran dilahirkan di Bone pada tahun 1993. Penulis pendidikan S1 di sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puangrimaglatung Bone (STIA PRIMA BONE) Pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Bosowa Makassar pada tahun 2017.

Sejak mahasiswa penulis aktif di kemahasiswaan dan bergabung di organisasi kemahasiswaan ekstra kampus di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada tahun 2014. Penulis aktif menyuarakan aspirasi rakyat di jalan dan mengawal setiap kebijakan pemerintah lokal maupun nasional. Penulis pernah mengikuti seminar kebangsaan empat pilar yang di adakan oleh MPR, dan pernah mengikuti workshop penulisan artikel ilmiah program pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.

Penulis pernah terlibat sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah tahun 2018 dan pemilihan umum 2019, dan berhasil menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone dimana pada saat itu banyak polemik yang terjadi dimasyarakat.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Surat rekomendasi izin penelitian dari Universitas Bosowa Program Pascasarjana



UNIVERSITAS BOSOWA

PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Telp. (0411) 452901 - 452789 Fax. (0411) 424568
Website: <http://www.unibos.ac.id> E-mail: pascasarjana_empati@yaho.com
MAKASSAR - INDONESIA

Makassar, 10 September 2019
 No. : **681/B.03/PPs/Unibos/IX/2019**
 Lamp. : **Satu buah Proposal Penelitian**
 Hal : **Izin Penelitian dan Pengambilan Data**

Kepada Yth.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone
 di
 Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Penelitian pada Tanggal **Sembilan** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa atas nama:

Nama	: ALI YUSRAN
NIM	: 4617103048
Program Studi	: Magister Administrasi Publik
Konsentrasi Studi	:
Judul Tesis	: Implementasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone

Untuk mendukung penulisan Tesis Mahasiswa tersebut di atas maka Kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitian.

Mahasiswa tersebut di atas dibimbing oleh:

1. Prof.Dr.H.A.Rasyid Pananrangi,SH,M.Pd.
2. Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si.

Demikian permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih



Direktur
 U.b. Asisten Direktur,
Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si.
 NIDN. 00 1501 6704

Tembusan:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Direktur PPs Universitas Bosowa
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Peringgal



Scanned with
CamScanner

Lampiran II

Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu terpadu Kabupaten Bone



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN
 Nomor: 070/12.1657/XI/IP/DPMPTSP/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **ALI YUSRAN**
 NIP/Nim/Nomor Pokok : 4617103048
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Dusun Barugae Desa Bolli Kec. Ponre
 Pekerjaan : Mahasiswa PPs Universitas Bosowa Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Tesis dengan Judul :

“ IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BOLLI KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE ”

Lamanya Penelitian : 12 November 2019 s/d 12 Desember 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone .
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) examplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 12 November 2019





Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
4. Camat Ponre Kab. Bone di Lonrong
5. Kepala Desa Bolli Kec. Ponre di Bolli
6. Arsip



Scanned with
CamScanner

Lampiran III

Pedoman Wawancara

Nama :

Jabatan :

Alamat :

A. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Pembangunan apa yang direncanakan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal di desa Bolli melalui anggaran dana desa?
2. Pembangunan apa yang direncanakan dalam menciptakan akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan melalui anggaran dana desa?
3. Pembangunan apa yang direncanakan dalam percepatan pemenuhan inprastruktur dasar melalui dana desa?

B. IMPLEMENTASI DANA DESA.

1. Bagaiman pemenuhan pembangunan kebutuhan dasar di desa Bolli melalui dana desa?
 - a. Dari Segi sosial?
 - b. Dari Segi ekonomi?
 - c. Dari Segi pendidikan?
 - d. Dari Segi kesehatan?
2. Dalam pembangunan sarana dan prasarana desa, apa saja yang telah dibangun di desa bolli melalui dana desa?
3. Melalui dana desa, apa upaya dalam pengembangan potensi ekonomi lokal melalui dana desa?

4. Apa upaya dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui anggaran dana desa?
5. Apa yang telah dilakukan dalam meningkatkan kapasitas warga di desa bolli melalui anggaran dana desa?
6. Bagaimana atau apa upaya yang telah dilakukan untuk mendukung kegiatan BUMDES melalui anggaran dana desa?

C. EVALUASI DANA DESA.

1. Bagaimana output dan outcome dana desa di desa Bolli?

Ket: Output:

- a. Jalan desa.....m
- b. Jembatan.....unit
- c. Sambungan air.....unit
- d. Embung desa.....unit
- e. PAUD.....unit
- f. Sumur.....unit
- g. Drainase/irigasi.....m
- h. Dll.....

Outcome:

- a. Presentasi Jumlah penduduk miskin.....%
2. Apa dampak dana desa terhadap terhadap kemandirian desa?
3. Bagaimana tahap penyaluran dan penyerapan dana desa di desa Bolli?
4. Apa saja yang menjadi kendala dalam peenyaluran dan penggunaan dana desa di desa bolli?

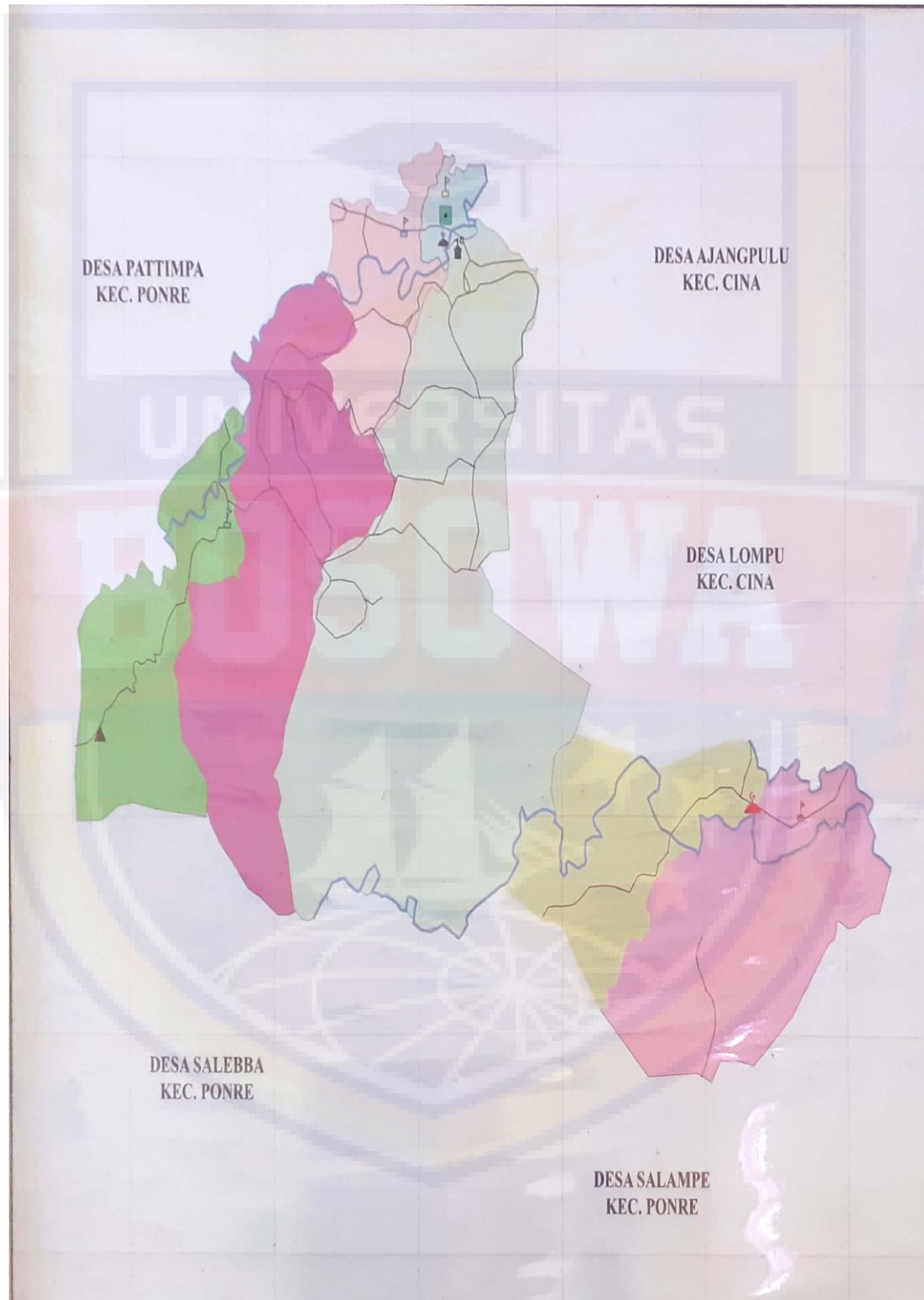
Lampiran IV

Daftar Nama Informan Penelitian

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN	KET
1	ANDI NAJAMUDDIN MADDANRA	AN	Kepala Desa	
2	ANDI JUPASNI, S.Pd.	AJ	Sekretaris Desa	
3	ANDI MULAWATI	AW	Kaur Keuangan	
4	ANDI MASTAR	AM	Kepala Dusun Bolli	
5	APRIANTO, S.Sos	AA	Kepala Dusun Lawari	
6	BASRI	BR	Kepala Dusun Padangloang	
7	JULIANTI	JA	Kepala Dusun Ciro	
8	MESRA	MR	Kepala Dusun Barugae	
9	ASRIADI, S.Sos	AD	Kepala Dusun Sancereng	
10	JUSMAN, SH	JM	Kepala Dusun Maroanging	
11	HASNA	HN	Ketua BPD	

Lampiran V

Dena Desa Bolli



Sumber: Administrasi Desa Bolli 2019

LAMPIRAN VI

Dokumentasi hasil penelitian

1. Jalan Desa

a. Dusun barugae



Realisasi pembangunan jalan beton di dusun barugae

b. Dusun ciro



Realisasi pembangunan jalan desa di dusun ciro

c. Dusun sancereng



Realisasi pembangunan jalan desa di dusun sancereng

d. Dusun maroanging



Realisasi pembangunan jalan desa di dusun maroanging

2. Jembatan

a. Jembatan dusun ciro



Realisasi pembangunan jembatan dengan melakukan renovasi di dusun ciro

b. Jembatan dusun sancereng



Realisasi pembangunan jembatan di dusun sancereng

c. Jembatan dusun maroanging



Realisasi pembangunan jembatan di dusun maroanging

3. Pembangunan Jembatan

Dusun sancereng



Aktivitas pembangunan jembatan di dusun sancereng

4. PAUD

a. PAUD dusun sancereng



Realisasi pembangunan PAUD dengan melakukan renovasi di dusun sancereng

b. PAUD dusun Maroanging



Realisasi pembangunan PAUD di dusun maroanging

5. Sumur

Sumur dusun barugae



Realisasi pembangunan sumur galian di dusun barugae

6. Jalan Tani

a. Dusun lawari



Realisasi pembangunan jalan tani di dusun lawari

b. Jalan tani dusun barugae



Realisasi pembangunan jalan tani di dusun barugae